



Katalog BPS : 5141.12



SENSUS PERTANIAN 2003

ANALISIS SUBSEKTOR :

- * Palawija
- * Perkebunan
- * Holtikultura
- * Peternakan

BPS Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

SENSUS PERTANIAN 2003

ANALISIS SUBSEKTOR : Palawija
Perkebunan
Hortikultura
Peternakan

ISBN :
Katalog BPS : 5141.12
No.Publikasi : 12550.05.10
Ukuran Buku : 28 x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 102 Halaman
Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis
Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor
Penanggung Jawab : H.M. Nasir Syarbaini, SE
Penyunting : Drs. Akhmad Jaelani, MSi
Penulis : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis
Pengumpul dan Pengolah Data : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis
Gambar Kulit : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis
Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Sumber Dana : Sensus Pertanian 2003
Provinsi Sumatera Utara

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Analisis Subsektor ini merupakan analisis sederhana dari hasil Pencacahan Rumah Tangga Usaha Pertanian pada Sensus Pertanian 2003. Sub sektor yang dianalisis antara lain sub sektor palawija, perkebunan, hortikultura dan peternakan yang diusahakan rumah tangga. Analisis dilakukan sebatas pemaparan terhadap Profil Rumah Tangga Usaha, Struktur Ongkos dan Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha.

Kegiatan analisis ini masih terkait dengan pelatihan analisis statistik pertanian 2003 yang diikuti Ka.Sie Analisis Statistik Lintas Sektor, Bidang Statistik Neraca Wilayah BPS Provinsi di seluruh Indonesia.

Analisis ini masih mengandung banyak kelemahan baik yang berkaitan dengan teknik penulisan, teknik analisis maupun tampilannya. Saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan sangat diharapkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya publikasi ini diucapkan terima kasih.

Medan, Desember 2005
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Utara

H. M. Nasir Syarbaini, SE
NIP. 340003769

ABSTRAKSI

Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan ekspor, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan pangan nasional. Selain sumbangan tersebut, sektor pertanian juga memiliki kontribusi dalam mempererat keterkaitan antar industri, konsumsi dan investasi.

Hasil pembangunan sektor pertanian di Sumatera Utara pada tahun 2002 menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan jika dibandingkan dengan keadaan di tahun 2001. Pada tahun 2002, pertumbuhan sektor pertanian yang dicapai sebesar 2,53 persen, lebih rendah dari pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2001 yaitu 3,80 persen. Sedangkan kontribusi yang diberikan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara pada periode yang sama tidak mengalami perubahan yang berarti dengan kontribusi sektor pertanian masing-masing mencapai 26,95 persen di tahun 2001 dan 26,94 persen di tahun 2002.

Untuk meningkatkan kembali kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, perlu dirancang kebijaksanaan yang tepat dan benar yang harus dibuat dengan menggunakan data yang akurat dan up to date. Sensus Pertanian 2003 (ST03) bertujuan untuk mengumpulkan data tersebut.

Sensus Pertanian 2003 mencatat rumah tangga pertanian di Sumatera Utara mencapai 1.262.421 rumah tangga, 394.762 rumah tangga diantaranya menekuni usaha pertanian tanaman palawija dan lebih dari separuh (52,07 persen) petani hanya tamatan sekolah dasar (SD) ke bawah.

Walaupun sudah menjadi anggota KUD/Koperasi Tani, 41,81 persen rumah tangga menyatakan masalah utama rumah tangga usaha tanaman palawija adalah harga produksi yang rendah dan kekurangan modal.

Rumah tangga usaha perkebunan sebanyak 591.609 rumahtangga (9,06 persen dari total rumah tangga usaha perkebunan di Indonesia). Jenis tanaman perkebunan yang diusahakan rumah tangga antara lain aren/enau, cengkeh, gambir, kakao, karet, kayu manis, kelapa sawit, kelapa, kemenyan, kemiri, kopi, nilam, pinang dan tembakau. Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, pekebun didominasi oleh mereka dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD/setara dan SLTP/setara.

Hasil ST03 mencatat banyaknya rumah tangga usaha perkebunan menurut penguasaan lahan, didominasi oleh rumah tangga dengan penguasaan lahan antara 10.000 – 19.999 m² dan 5.000 – 9.999 m² dengan persentase masing-masing mencapai 32,28 persen dan 24,49 persen. Sementara rumah tangga usaha tanaman perkebunan yang hanya menguasai lahan kurang dari 1.000 m² persentasenya tidak sampai 1 persen dan rumah tangga usaha tanaman perkebunan yang mampu menguasai lahan lebih dari 30.000 m² sebesar 11,55 persen dari total rumah tangga usaha tanaman perkebunan.

Dari 338.617 rumah tangga petani usaha tanaman hortikultura di Sumatera Utara, sebanyak 28,05 persen rumah tangga memilih tanaman pisang sebagai tanaman hortikultura yang diusahakan, disusul oleh tanaman cabe merah, tanaman rambutan dan tanaman durian.

Umumnya, rumah tangga petani usaha tanaman hortikultura di Sumatera Utara adalah masih tergolong sebagai rumah tangga petani gurem. Hal ini ditunjukkan oleh 80,84 persen rumah tangga hortikultura mengusahakan lahan dengan luas < 0,50 Ha, disusul oleh mereka yang mengusahakan lahan dengan luas 0,50 – 0,99 Ha.

Bila dilihat menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, petani usaha tanaman hortikultura baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat pendidikan yang sama. Petani dengan tingkat pendidikan SD/setara baik laki-laki maupun perempuan menempati urutan pertama, disusul oleh mereka yang berpendidikan SLTP/setara.

Berdasarkan hasil ST'03, jumlah rumah tangga usaha peternakan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 261.626 rumah tangga (20,72 persen) dari rumah tangga pertanian di Sumatera Utara dan dalam satu rumah tangga usaha peternakan ada lebih dari satu orang peternak/pengusaha ternak atau sekitar 1,12 orang per rumah tangga.

Dari sebanyak 261.626 rumah tangga usaha peternakan di Sumatera Utara, hanya ada 0,92 persen yang pernah mendapat pelayanan koperasi, sedangkan yang pernah mendapat pelayanan kelompok tani hanya 0,87 persen dan yang pernah mengikuti bimbingan hanya 1,77 persen.

Jika dilihat kondisi ekonominya, dari 261.626 rumah tangga usaha peternakan terdapat 0,61 persen mengalami penurunan ekonomi, sedangkan 15,57 persen lainnya mengalami kekurangan uang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan 31,09 persen menganggap berat pembiayaan sekolah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstraksi	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II. METODOLOGI	
2.1. Sumber Data	4
2.2. Konsep dan Definisi	4
2.3. Metode Analisis	18
BAB III. ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA PALAWIJA	
3.1. Profil Rumah Tangga Usaha Palawija	19
3.1.1. Distribusi Rumah Tangga Usaha Palawija	19
3.1.2. Karakteristik Petani Palawija	20
3.1.3. Penguasaan dan Penggunaan Lahan	22
3.2. Struktur Ongkos dan Pendapatan Rumah Tangga Usaha Palawija	23
3.2.1. Struktur Ongkos	23
3.2.2. Struktur Pendapatan	27
3.3. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Palawija	29
3.3.1. Ketenagakerjaan dan Gender	29
3.3.2. Akses Petani Palawija ke Sumber Daya Produktif	31
BAB IV. ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA PERKEBUNAN	
4.1. Profil Rumah Tangga Usaha Perkebunan	43
4.1.1. Distribusi Rumah Tangga Usaha Perkebunan	43
4.1.2. Karakteristik Pekebun	44
4.1.3. Penguasaan dan Penggunaan Lahan	45
4.2. Struktur Ongkos dan Pendapatan Rumah Tangga Usaha Perkebunan	47
4.2.1. Struktur Ongkos	47
4.2.2. Struktur Pendapatan	51
4.3. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Perkebunan	54
4.3.1. Ketenagakerjaan dan Gender	54
4.3.2. Akses Pekebun ke Sumber Daya Produktif	57

BAB V.	ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA HORTIKULTURA	
5.1.	Profil Rumah Tangga Usaha Hortikultura	60
5.1.1.	Distribusi Rumah Tangga Usaha Hortikultura	60
5.1.2.	Karakteristik Petani Hortikultura	61
5.1.3.	Penguasaan dan Penggunaan Lahan	64
5.2.	Struktur Ongkos dan Pendapatan Rumah Tangga Usaha Hortikultura	65
5.2.1.	Struktur Ongkos	65
5.2.2.	Struktur Pendapatan	69
5.3.	Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Hortikultura	71
5.3.1.	Ketenagakerjaan dan Gender	71
5.3.2.	Akses Petani Hortikultura ke Sumber Daya Produktif ..	76
BAB VI.	ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN	
6.1.	Profil Rumah Tangga Usaha Peternakan	79
6.1.1.	Distribusi Rumah Tangga Usaha Peternakan	79
6.1.2.	Karakteristik Peternak	80
6.2.	Struktur Ongkos dan Pendapatan Rumah Tangga Usaha Peternakan	83
6.2.1.	Struktur Ongkos	83
6.2.2.	Struktur Pendapatan	87
6.3.	Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Peternakan	89
6.3.1.	Ketenagakerjaan dan Gender	89
6.3.2.	Akses Peternak ke Sumber Daya Produktif	93
BAB VII.	KESIMPULAN DAN SARAN	
7.1.	Kesimpulan	101
7.2.	Saran	102

DAFTAR TABEL

No.	J u d u l	Halaman
3.1.	Persentase Petani Tanaman Palawija dan Buruh Usaha Tanaman Palawija Menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan	20
3.2.	Persentase Petani Palawija Menurut Jenjang Pendidikan Dan Status Pekerjaan	21
3.3.	Persentase Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Luas Lahan Yang dikuasai dan Diusahakan	23
3.4.	Persentase Ongkos Usaha Tanaman Palawija Menurut Jenis Pengeluaran	24
3.5.	Persentase Ongkos Usaha Tanaman Palawija Menurut Jenis Ongkos dan Jenis Tanaman	25
3.6.	Persentase Rumah Tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Kelompok Luas Lahan dan Kategori Pendapatan dari Usaha Palawija	27
3.7.	Persentase Rumah Tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Sumbangan Pendapatan dari Usaha Tanaman Palawija	28
3.8.	Persentase Jumlah Pekerja pada Rumah Tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Status Pekerja, Jenis Kelamin dan Jenis Tanaman	29
3.9.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Jenis Kegiatan dan Pengambil Keputusan dalam Rumah tangga	30
3.10.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Pihak Yang Memberikan Kredit Terbesar dan Jenis Tanaman	31
3.11.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Cara Perontokan Yang Utama dan Jenis Tanaman	33
3.12.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Alasan Tidak Dilakukan Pengendalian OPT dan Jenis Tanaman	34
3.13.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Tempat Penjualan Hasil Panen dan Jenis Tanaman	36
3.14.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Penyebab Kesulitan Utama Untuk Dijual	38

3.15.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Alasan Utama Tidak menjadi Anggota KUD	39
3.16.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Alasan Utama Tidak menjadi Anggota Kelompok Tani	40
3.17.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Jenis Keanggotaan dan Masalah Utama Yang Dihadapi	41
3.18.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Jenis Keanggotaan dan Masalah Utama Yang Dihadapi	41
3.19.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Jenis Keanggotaan dan Masalah Utama Yang Dihadapi	42
4.1.	Persentase Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Menurut Jenis Tanaman	43
4.2.	Persentase Jumlah Pekebun Menurut Kelompok Umur	44
4.3.	Persentase Jumlah Pekebun Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	45
4.4.	Persentase Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Menurut Golongan Luas Lahan Yang dikuasai dan Diusahakan	46
4.5.	Persentase Pengeluaran per 100 Pohon/Ha dari Usaha Perkebunan	47
4.6.	Persentase Rumah tangga Usaha Perkebunan Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Status Pekerjaan	51
4.7.	Persentase Rumah tangga Usaha Perkebunan Menurut Luas Lahan Yang Diusahakan untuk Perkebunan dan Kategori Pendapatan dari Usaha Perkebunan	52
4.8.	Persentase Rumah Tangga Usaha Perkebunan Menurut Sumbangan Pendapatan dari Usaha Perkebunan	53
4.9.	Persentase Petani Usaha Tanaman Perkebunan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	54
4.10.	Persentase Petani Usaha Tanaman Perkebunan Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	55

4.11.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Kegiatan dan Pengambil Keputusan dalam Rumah tangga	56
4.12.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Perkebunan Keikutsertaan Menurut Jenis Keanggotaan	57
4.13.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Perkebunan menurut Alasan Utama Tidak menjadi Anggota KUD	58
4.14.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Perkebunan menurut Alasan Utama Tidak menjadi Anggota Kelompok Tani	58
4.15.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Perkebunan menurut Jenis Pelayanan Yang Pernah Diterima dari KUD dan Keanggotaan KUD	59
5.1.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Tanaman Yang Diusahakan Setahun Yang Lalu	61
5.2.	Persentase Petani Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan	62
5.3.	Persentase Petani Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Pendidikan dan Status Pekerjaan	63
5.4.	Persentase Rumah Tangga Usaha Hortikultura Menurut Kelompok Luas Lahan Di Sumatera Utara	64
5.5.	Rata-rata Produksi dan Produktifitas per Ha Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Tanaman Terpilih	66
5.6.	Persentase Struktur Ongkos Produksi dari Usaha Hortikultura Menurut Jenis Tanaman Terpilih	67
5.7.	Persentase Rumah Tangga Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Status Pekerjaan	70
5.8.	Persentase Rumah Tangga Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Kelompok Luas Lahan dan Kategori Pendapatan	70
5.9.	Persentase Petani Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	72
5.10.	Persentase Buruh Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	73

5.11.	Persentase Petani Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Pendidikan dan Status Pekerjaan	74
5.12.	Persentase Buruh Tanaman Hortikultura Menurut Pendidikan dan Status Pekerjaan	75
5.13.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Kegiatan dan Pengambil Keputusan dalam Rumah tangga	76
5.14.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Keanggotaan	77
5.15.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Hortikultura menurut Alasan Utama Tidak menjadi Anggota KUD	78
5.16.	Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Hortikultura menurut Alasan Utama Tidak menjadi Anggota Kelompok Tani	78
6.1.	Jumlah Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Ternak/Unggas yang Diusahakan	80
6.2.	Jumlah Peternak di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Ternak/Unggas yang Diusahakan dan Jenis Kelamin	81
6.3.	Jumlah Peternak di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	82
6.4.	Jumlah Peternak di Provinsi Sumatera Utara Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin	83
6.5.	Nilai Produksi Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Ternak/Unggas dan Jenis Produksinya (000 Rp.)	84
6.6.	Struktur Ongkos Produksi Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Kegiatan Usaha (000 Rp.)	85
6.7.	Struktur Ongkos terhadap Nilai Produksi Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara menurut Jenis Ternak/Unggas dan Jenis Ongkos Produksi (Persen)	86
6.8.	Struktur Ongkos terhadap Nilai Produksi Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara menurut Jenis Kegiatan Usaha dan Jenis Ongkos Produksi (Persen)	87

6.9.	Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Sumber Pendapatan Utama	88
6.10.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Persentase Sumbangan pada Pendapatan Rumah Tangga Usaha Peternakan	89
6.11.	Jumlah Pekerja Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Ternak/Unggas dan Jenis Pekerja	90
6.12.	Jumlah Pekerja Dibayar pada Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara menurut Jenis Ternak/Unggas dan Jenis Kelamin (Persen)	91
6.13.	Rata-rata Upah per Hari (000 Rp.) Pekerja Usaha Peternakan menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin	91
6.14.	Persentase Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Kegiatan dan Pengambilan Keputusan	92
6.15.	Persentase jumlah Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara menurut Keikutsertaan dalam Pelayanan dan Bimbingan	94
6.16.	Persentase Jumlah Peternak di Provinsi Sumatera Utara Menurut Keikutsertaan dalam Pelayanan dan Bimbingan	95
6.17.	Persentase Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Sumber Kredit/Tambahan Modal untuk Usaha selama Setahun yang lalu dan Aksesnya	96
6.18.	Persentase Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Sumber Kredit/Tambahan Modal untuk Usaha selama Setahun yang lalu dan Alasan kesulitan dalam Memperoleh Kredit	97
6.19.	Persentase Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara yang Mengalami Kesulitan Pemasaran menurut Penyebab Kesulitan Pemasaran	99
6.20.	Persentase Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Yang mengalami Penurunan Ekonomi, Kekurangan Uang Cukup Besar, dan Menganggap Berat Biaya Sekolah menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah tangga	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan ekspor, penyediaan lapangan kerja, dan penyediaan pangan nasional. Selain sumbangan tersebut, sektor pertanian juga memiliki kontribusi dalam mempererat keterkaitan antar industri, konsumsi dan investasi.

Hasil pembangunan sektor pertanian di Sumatera Utara pada tahun 2002 menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan jika dibandingkan dengan keadaan di tahun 2001. Pada tahun 2002, pertumbuhan sektor pertanian yang dicapai sebesar 2,53 persen, lebih rendah dari pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2001 yaitu 3,80 persen. Sedangkan kontribusi yang diberikan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara pada periode yang sama tidak mengalami perubahan yang berarti dengan kontribusi sektor pertanian masing-masing mencapai 26,95 persen di tahun 2001 dan 26,94 persen di tahun 2002.

Untuk meningkatkan kembali kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, perlu dirancang kebijaksanaan yang tepat dan benar yang harus dibuat dengan menggunakan data yang akurat dan up to date. Sensus Pertanian 2003 (ST03) bertujuan untuk mengumpulkan data tersebut.

ST03 merupakan Sensus Pertanian yang kelima yang dilakukan oleh BPS. Sensus Pertanian yang pertama dilaksanakan pada tahun 1963 dan sejak itu BPS secara rutin menyelenggarakan Sensus Pertanian setiap 10 tahun sekali, sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dengan demikian hasil Sensus Pertanian yang pertama dapat dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian yang kedua, ketiga dan seterusnya, sehingga perubahan struktur pertanian di Indonesia dapat diikuti dari waktu ke waktu.

1.2 . Tujuan

- a. Mendapatkan gambaran mengenai usaha rumah tangga tanaman palawija, perkebunan, hortikultura, dan peternakan.
- b. Mendapatkan gambaran mengenai profil rumah tangga usaha pertanian yang meliputi distribusi rumah tangga usaha, karakteristik dan penguasaan dan penggunaan lahan.
- c. Mendapatkan gambaran mengenai struktur ongkos dan pendapatan rumah tangga usaha pertanian
- d. Mendapatkan gambaran mengenai keadaan sosial ekonomi rumah tangga usaha pertanian yang meliputi ketenagakerjaan dan gender dan akses ke sumber daya produktif.
- e. Memberikan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di bidang pertanian dan masukan untuk perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

1.3 . Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan cakupan analisis sub sektor ini meliputi rumah tangga yang berusaha di sektor pertanian yaitu usaha rumah tangga tanaman palawija, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, dan peternakan yang ada di Sumatera Utara.

1.4 . Sistematika Penulisan

Penyajian analisis subsektor Sensus Pertanian 2003 dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) bagian. Pada bagian pertama yang merupakan Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Pada bagian kedua yaitu Bab II Metodologi meliputi sumber data, konsep dan definisi serta metode analisis. Pada Bab III Analisis Rumah Tangga Usaha Palawija yang

merupakan bagian ketiga meliputi profil rumah tangga usaha palawija (distribusi rumah tangga usaha palawija, karakteristik petani palawija serta penguasaan dan penggunaan lahan), struktur ongkos dan pendapatan rumah tangga usaha palawija (struktur ongkos dan struktur pendapatan), keadaan sosial ekonomi rumah tangga usaha palawija (ketenagakerjaan dan gender serta akses petani palawija ke sumber daya produktif). Pada Bab IV Analisis Rumah Tangga Usaha Perkebunan meliputi profil rumah tangga usaha perkebunan (distribusi rumah tangga usaha perkebunan, karakteristik pekebun serta penguasaan dan penggunaan lahan), struktur ongkos dan pendapatan rumah tangga usaha perkebunan (struktur ongkos dan struktur pendapatan), keadaan sosial ekonomi rumah tangga usaha perkebunan (ketenagakerjaan dan gender serta akses pekebun ke sumber daya produktif). Pada Bab V Analisis Rumah Tangga Usaha Hortikultura meliputi profil rumah tangga usaha hortikultura (distribusi rumah tangga usaha hortikultura, karakteristik petani hortikultura serta penguasaan dan penggunaan lahan), struktur ongkos dan pendapatan rumah tangga usaha hortikultura (struktur ongkos dan struktur pendapatan), keadaan sosial ekonomi rumah tangga usaha hortikultura (ketenagakerjaan dan gender serta akses petani hortikultura ke sumber daya produktif). Pada Bab VI Analisis Rumah Tangga Usaha Peternakan meliputi profil rumah tangga usaha peternakan (distribusi rumah tangga usaha peternakan dan karakteristik peternak), struktur ongkos dan pendapatan rumah tangga usaha peternak (struktur ongkos dan struktur pendapatan), keadaan sosial ekonomi rumah tangga usaha peternakan (ketenagakerjaan dan gender serta akses peternak ke sumber daya produktif). Dan bagian terakhir adalah Bab VII Kesimpulan dan Saran.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam analisis sub sektor ini berasal dari pelaksanaan Survei Rumah Tangga Usaha Palawija, Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan, Survei Rumah Tangga Usaha Hortikultura dan Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan yang merupakan lanjutan dari pelaksanaan Sensus Pertanian 2003.

2.2. Konsep dan Definisi

a. Rumah tangga

Rumah tangga biasa adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.

b. Rumah tangga Pertanian

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian apabila rumah tangga tersebut melakukan minimal salah satu kegiatan berikut :

(1) Pengguna lahan

- Mengusahakan tanaman padi dan atau palawija
- Mengusahakan tanaman hortikultura
- Mengusahakan tanaman perkebunan
- Mengusahakan tanaman kehutanan
- Mengusahakan ternak/unggas
- Membudidayakan ikan/biota lain di air tawar

- Membudidayakan ikan/biota lain di tambak air payau
- Mengusahakan penangkaran satwa liar

(2) Bukan Pengguna Lahan

- Membudidayakan ikan/biota lain di air laut
- Membudidayakan ikan/biota lain di perairan umum
- Menangkap ikan/biota lain di laut
- Menangkap ikan/biota lain di perairan umum
- Memungut hasil hutan dan atau menangkap satwa liar
- Berusaha di bidang jasa pertanian

c. Rumah tangga Petani Gurem

Rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 Ha.

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian padi/palawija apabila rumah tangga tersebut menanam padi/palawija, dengan tujuan seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri maupun dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha. Khusus untuk usaha tanaman padi/palawija tidak ada batas minimal usaha (BMU).

d. Rumah tangga Padi/Palawija

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian padi/palawija apabila rumah tangga tersebut menanam padi/palawija, dengan tujuan seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri maupun dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha. Khusus untuk usaha tanaman padi/palawija tidak ada batas minimal usaha (BMU).

e. Rumah tangga Hortikultura

Usaha tanaman hortikultura adalah kegiatan yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan dengan

tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian hortikultura apabila banyak pohon/rumpun/luas tanaman hortikultura yang diusahakan rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU) masing-masing jenis tanaman tersebut.

Tanaman Buah-buahan Tahunan

Kode	Jenis Tanaman Buah-buahan	Satuan	Batas Minimal Usaha (BMU)
201	Alpukat	pohon	25
202	Anggur	pohon	20
203	Apel	pohon	10
204	Belimbing	pohon	10
205	Cempedak	pohon	15
206	Duku	pohon	10
207	Durian	pohon	3
208	Jambu Air	pohon	40
209	Jambu Biji	pohon	40
210	Jeruk	pohon	18
211	Kedondong	pohon	30
212	Kesemek	pohon	25
213	Lengkeng/Leci	pohon	3
214	Mangga	pohon	4
215	Manggis	pohon	3
216	Markisa	pohon	20
217	Nangka	pohon	25
218	Nenas	rumpun	100
219	Pepaya	pohon	35
220	Pisang	rumpun	12
221	Rambutan	pohon	2
222	Salak	rumpun	20
223	Sawo	pohon	10
224	Sirsak	pohon	80
225	Strawberry	pohon	70
299	Lainnya	pohon	**

Tanaman Buah-buahan Semusim

Kode	Jenis Tanaman Buah-buahan	Satuan	Batas Minimal Usaha (BMU)
335	Blewah	m ²	100
336	Melon	m ²	100
337	Semangka	m ²	100
338	Timun Suri	m ²	100
399	Lainnya	m ²	**

Tanaman Sayuran Tahunan

Kode	Jenis Tanaman Sayuran	Satuan	Batas Minimal Usaha (BMU)
226	Jengkol	pohon	10
227	Kluwih/Timbul	pohon	25
228	Mlinjo	pohon	20
229	Petai	pohon	10
230	Sukun	pohon	20
299	Lainnya	pohon	**

Catatan : Khusus untuk tanaman tahunan adalah tanaman yang sudah berproduksi

Tanaman Sayuran Semusim

Kode	Jenis Tanaman Sayuran	Satuan	Batas Minimal Usaha (BMU)
301	Bawang Daun	m ²	400
302	Bawang merah	m ²	600
303	Bawang putih	m ²	250
304	Bayam	m ²	100
305	Buncis	m ²	250
306	Bloomkol/kembang kol	m ²	250
307	Brokoli	m ²	250
308	Cabe hijau	m ²	600
309	Cabe merah	m ²	500
310	Cabe rawit	m ²	350
311	Gambas/oyong	m ²	200
312	Gude	m ²	250
313	Jamur	m ²	100
314	Kacang panjang	m ²	250
315	Kacang merah	m ²	250
316	Kapri	m ²	250

Tanaman Sayuran Semusim

Kode	Jenis Tanaman Sayuran	Satuan	Batas Minimal Usaha (BMU)
317	Kangkung	m ²	100
318	Kecipir	m ²	250
319	Kentang	m ²	200
320	Ketimun	m ²	500
321	Komah	m ²	250
322	Kratoh	m ²	250
323	Kubis	m ²	300
324	Labu siam	m ²	200
325	Lobak	m ²	400
326	Paprika	m ²	200
327	Petsai/sawi	m ²	300
328	Rebung	m ²	250
329	Selada	m ²	300
330	Seledri	m ²	250
331	Terung	m ²	900
332	Tomat	m ²	800
333	Waluh/labu kuning	m ²	2.000
334	Wortel	m ²	300
399	Lainnya	m ²	**

Tanaman Hias

Kode	Jenis Tanaman Hias	Satuan	Batas Minimal Usaha (BMU)
339	Anggrek	m ²	50
340	Dracaena	m ²	100
341	Gladiol	m ²	174
342	Heliconia/pisang-pisangan	m ²	100
343	Krisan	m ²	100
344	Kuping gajah	m ²	100
345	Mawar	m ²	100
346	Melati	m ²	100
347	Pakis	m ²	50
348	Palem	m ²	50
349	Sedap malam	m ²	400
399	Lainnya	m ²	**

Tanaman Obat-obatan

Kode	Jenis Tanaman Obat-obatan	Satuan	Batas Minimal Usaha (BMU)
350	Jahe	m ²	100
351	Keji Beling	M ²	50
352	Kencur	m ²	90
353	Kunyit	m ²	100
354	Laos/lengkuas	m ²	100
355	Lidah buaya	m ²	100
356	Sambiroto	m ²	100
357	Temu giring	m ²	100
358	Temu ireng	m ²	70
359	Temu kunci	m ²	70
360	Temu lawak	m ²	100
399	Lainnya	m ²	**

Catatan : **) Untuk rumah tangga yang menguasai/mengusahakan tanaman hortikultura yang tidak mempunyai batas minimal usaha, maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga hortikultura apabila nilai produksi kotornya lebih besar atau sama dengan Rp.700.000,- per tahun.

f. Rumah tangga Perkebunan

Usaha tanaman perkebunan adalah kegiatan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian perkebunan apabila banyak pohon/rumpun/lajar/luas tanaman perkebunan yang diusahakan rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU) masing-masing jenis tanaman tersebut.

Tanaman Perkebunan Tahunan

Kode	Jenis Tanaman Perkebunan	Satuan	Batas Minimal Usaha (BMU)
401	Aren/Enau	pohon	25
402	Asam jawa	pohon	35
403	Cengkeh	pohon	15
404	Gambir	pohon	135
405	Jambu mete	pohon	85
406	Jelutung	pohon	25
407	Kakao	pohon	30
408	Kapok	pohon	25
409	Kapolaga	pohon	700
410	Karet	pohon	150
411	Kayu manis	pohon	250
412	Kelapa sawit	pohon	15
413	Kelapa	pohon	25
414	Kemenyan	pohon	280
415	Kemiri	pohon	15
416	Kenanga	pohon	50
417	Kina	pohon	300
418	Klerek	pohon	25
419	Kopi	pohon	75
420	Lada	lajar	15
421	Lontar	pohon	25
422	Murbai	pohon	500
423	Nilam	pohon	700
424	Panili/Vanili	lajar	75
425	Pala	pohon	5
426	Pandan anyaman	rumpun	25
427	Pinang/jambe	pohon	50
428	Sagu	pohon	25
429	Soga	pohon	25
430	Teh	pohon	1.000
499	Lainnya	pohon	**

Catatan : Khusus untuk tanaman perkebunan tahunan adalah tanaman yang sudah berproduksi.

Tanaman Perkebunan Semusim

Kode	Jenis Tanaman Perkebunan	Satuan	Batas Minimal Usaha (BMU)
501	Abaca/manila	m ²	800
502	Akar wangi	m ²	500
503	Kapas	m ²	1.950
504	Kenaf	m ²	**
505	Rami/rosela	m ²	3.846
506	Rumput sudan/gajah	m ²	500
507	Sereh	m ²	500
508	Tebu	m ²	650
509	Tembakau	m ²	1.600
510	Yute	m ²	800
599	Lainnya	m ²	**

Catatan : **) Untuk rumah tangga yang menguasai/mengusahakan tanaman perkebunan yang tidak mempunyai batas minimal usaha, maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga perkebunan apabila nilai produksi kotornya lebih besar atau sama dengan Rp.700.000,- per tahun.

g. Rumah tangga Budidaya Tanaman Kehutanan

Usaha budidaya tanaman kehutanan adalah kegiatan yang menghasilkan produk tanaman kehutanan (kayu) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian tanaman kehutanan apabila banyak pohon tanaman kehutanan yang siap tebang yang diusahakan rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU) masing-masing jenis tanaman tersebut.

Tanaman Kehutanan

Kode	Jenis Tanaman Kehutanan	Satuan	Batas Minimal Usaha (BMU)
601	Akasia	pohon	9
602	Bambu	rumpun	10

Tanaman Kehutanan

Kode	Jenis Tanaman Kehutanan	Satuan	Batas Minimal Usaha (BMU)
603	Cemara	pohon	9
604	Cempaka	pohon	2
605	Cendana	pohon	1
606	Eucalyptus	pohon	9
607	Gmelina	pohon	3
608	Jati	pohon	1
609	Johar	pohon	7
610	Kamper	pohon	2
611	Kruing	pohon	3
612	Maja	pohon	3
613	Mahoni	pohon	2
614	Meranti	pohon	5
615	Pinus	pohon	5
616	Rasamala	pohon	4
617	Rotan	rumpun	10
618	Sengon	pohon	12
619	Sonokeling	pohon	2
620	Suren	pohon	3
621	Sungkai	pohon	2
622	Tengkawang	pohon	3
699	Lainnya	pohon	**

Catatan : **) Untuk rumah tangga yang menguasai/mengusahakan tanaman kehutanan yang tidak mempunyai batas minimal usaha, maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga budidaya kehutanan apabila nilai produksi kotornya lebih besar atau sama dengan Rp.700.000,- per tahun.

h. Rumah tangga peternakan/perunggasan

Usaha peternakan/perunggasan adalah kegiatan yang menghasilkan produk peternakan (melakukan pemeliharaan ternak/unggas) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian peternakan apabila jumlah ternak/unggas yang diusahakan oleh rumah tangga pada saat pencacahan lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU) jenis ternak/unggasnya masing-masing. Pemeliharaan ternak untuk usaha pengangkutan, dan hobi tidak termasuk dalam usaha peternakan. Sedangkan pedagang ternak yang melakukan pemeliharaan sekurang-kurangnya tiga bulan dikategorikan sebagai memelihara/mengusahakan ternak.

Batas minimal usaha dalam bentuk fisik ternak/unggas sebagai berikut :

Kode	Jenis Ternak/Unggas	Batas Minimal Usaha (BMU)
a. Ternak besar		
701	Kerbau	2
702	Kuda	2
703	Sapi	2
704	Sapi perah (sudah laktasi)	1
b. Ternak kecil		
705	Babi (umur 2 bulan)	3
706	Domba	6
707	Kambing	6
708	Kelinci	30
709	Lebah	**
710	Rusa	6
c. Unggas (umur 1 bulan, kecuali ayam ras pedaging)		
711	Angsa	20
712	Ayam buras/kampung	30
715	Burung dara	30
716	Burung puyuh	30
717	Itik	15
718	Itik manila	15
d. Lainnya		
799	Ternak/unggas lainnya	**

Catatan : **) Untuk rumah tangga yang menguasai/mengusahakan ternak/unggas yang tidak mempunyai batas minimal usaha, maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga peternakan

apabila nilai produksi kotornya lebih besar atau sama dengan Rp.700.000,- per tahun.

i. Rumah tangga Budi daya Ikan/Biota lain di Kolam air tawar/sawah

Usaha budi daya ikan atau biota lain di kolam air tawar adalah kegiatan pembenihan atau pembesaran ikan/biota lain dengan menggunakan kolam (kolam air tenang atau air deras) sebagai sarana pemeliharaan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Budi daya ikan/biota lain di sawah adalah pemeliharaan ikan/biota lain yang dilakukan di sawah yang digenangi air. Biasanya ikan ditebarkan sebelum sawah ditanami padi atau pada saat padi masih berumur muda.

j. Rumah tangga budi daya ikan/biota lain di tambak air payau

Usaha budi daya ikan atau biota lain di tambak air payau adalah kegiatan budi daya (pemeliharaan) ikan/biota lain dengan menggunakan tambak air payau sebagai sarana pemeliharaan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha. Jenis ikan/biota lain yang biasa dipelihara antara lain bandeng, udang windu, udang putih, kakap putih, kepiting, dan ketam telapak kuda.

k. Rumah tangga budi daya ikan/biota lain di laut

Usaha budi daya ikan atau biota lain di laut adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain di laut atau di muara sungai, laguna, dan lainnya yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan menggunakan kurungan yang biasanya dibuat dari jaring, bambu, kayu atau bahan lainnya dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha. Jenis ikan/biota lain yang dibudidayakan di laut antara lain : rumput laut, kerang hijau, kepiting, kerapu, kakap merah/putih, teripang, dan penyau.

l. Rumah tangga budi daya ikan/biota lain di perairan umum

Usaha budi daya ikan atau biota lain di perairan umum adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain dengan menggunakan jaring apung, pancang pagar, atau keramba sebagai sarana pemeliharaan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha. Jenis ikan/biota lain yang dibudidayakan di perairan umum antara lain : ikan mas, lele, mujair, udang, katak, labi-labi.

m. Rumah tangga penangkapan ikan atau biota lain di laut

Usaha penangkapan ikan atau biota lain di laut adalah kegiatan penangkapan ikan, udang, atau lainnya di laut, muara sungai, laguna dan sebagainya yang dipengaruhi pasang surut air laut, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

n. Rumah tangga penangkapan ikan atau biota lain di perairan umum

Usaha penangkapan ikan atau biota lain di perairan umum adalah kegiatan penangkapan ikan/biota lain di perairan umum seperti sungai, waduk, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

o. Rumah tangga pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar

Usaha pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha. Jenis hasil hutan yang dipungut seperti kayu bakar, kayu pertukangan, bambu, rotan, damar, jelutung, jamur, lumut, madu, sarang burung, telur dan kotoran burung.

Usaha penangkapan satwa liar adalah kegiatan penangkapan satwa liar dan atau mengambil bagian-bagiannya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha, misalnya penangkapan ular, penangkapan buaya, penangkapan ayam hutan.

p. Rumah tangga jasa pertanian

Usaha jasa pertanian adalah kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak seperti melayani usaha di bidang pertanian.

Penjelasan :

- Jasa pertanian tanaman pangan/perkebunan meliputi jasa pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian jasad pengganggu, pemanenan dan pasca panen).
- Jasa peternakan meliputi jasa pelayanan kesehatan ternak, pemacekan ternak, penetasan telur dan pelayanan peternakan lainnya.
- Jasa perikanan meliputi jasa pengolahan lahan, pengendalian jasad pengganggu, persiapan lelang dan uji mutu.
- Jasa kehutanan meliputi jasa penebangan dan atau penanaman pohon.

q. Rumah tangga kuasa usaha pertanian

Kuasa usaha pertanian adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola usaha pertanian dengan mendapat upah/gaji.

r. Rumah tangga yang berusaha di bidang pengolahan hasil pertanian

Usaha pengolahan hasil pertanian adalah kegiatan yang mengubah bahan baku hasil pertanian baik yang dibeli maupun dari hasil sendiri menjadi barang jadi/setengah jadi atau barang yang lebih tinggi nilainya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Bahan baku hasil pertanian adalah semua bahan baku dari hasil pertanian yang merupakan produk primer, sedangkan barang jadi/setengah jadi merupakan hasil dari pengolahan pertama.

s. Buruh pertanian

Buruh pertanian adalah orang yang bekerja di sektor pertanian yaitu yang bekerja pada orang lain atau perusahaan yang jenis pekerjaannya masih erat dengan kegiatan pertanian atas dasar balas jasa dengan diberi upah/gaji baik berbentuk uang atau barang.

t. Lahan

Lahan yang dimiliki, meliputi :

- Lahan yang dibeli baik kontan maupun angsuran.
- Lahan warisan, yaitu lahan yang diterima oleh ahli waris berdasarkan pembagian dari harta orang yang telah meninggal dunia.
- Lahan yang diperoleh secara hibah, yaitu lahan yang diterima/didapat secara cuma-cuma dari badan/harta orang yang masih hidup.
- Lahan yang dimiliki berdasarkan land reform, permohonan biasa, pembagian lahan transmigrasi, pembagian lahan dari pembukaan hutan, hukum adat, dan penyerahan dari program Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Lahan yang berasal dari pihak lain, meliputi :

- Lahan sewa, yaitu lahan yang didapat dengan perjanjian sewa yang besarnya sewa sudah ditetapkan terlebih dahulu tanpa melihat besar/kecilnya hasil produksi.
- Lahan bagi hasil (sakap), yaitu lahan sewa tetapi dengan perjanjian besarnya sewa berdasarkan hasil panen/produksi dan dibayarkan setelah panen. Besarnya bagian yang akan diserahkan pada pemilik lahan sudah ditentukan lebih dahulu.
- Lahan gadai, yaitu lahan yang berasal dari pihak lain sebagai jaminan pinjaman uang pihak yang menggadaikan lahannya.
- Lahan bengkok/pelungguh, yaitu lahan milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau bekas pamong desa sebagai gaji atau pensiun.

- Lahan bebas sewa, serobotan, dan lahan garapan adalah lahan yang didapatkan dengan tanpa membeli atau membayar sewa, dan bukan merupakan lahan milik, tetapi hanya diijinkan memakai dengan bebas sewa.

Lahan yang berada di pihak lain, meliputi :

- Lahan yang disewakan.
- Lahan yang dibagihasilkan.
- Lainnya.

Lahan yang dikuasai adalah lahan milik sendiri ditambah lahan yang berasal dari pihak lain, dikurangi lahan yang berada di pihak lain. Lahan tersebut berupa lahan sawah dan atau lahan bukan sawah.

Lahan pertanian adalah lahan yang dikuasai, dan pernah diusahakan untuk pertanian selama setahun yang lalu. Lahan tersebut antara lain : lahan sawah, huma, ladang/tegal/kebun, kolam/tebat/empang, tambak, lahan perkebunan, hutan, dan lahan untuk penggembalaan/padang rumput.

2.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai usaha rumah tangga tanaman palawija, perkebunan, hortikultura, dan peternakan adalah metode deskripsi didasarkan atas tabel-tabel yang diperoleh dari pengolahan data survei-survei pertanian tersebut di atas. Demikian juga halnya dengan gambaran profil rumah tangga usaha pertanian (distribusi rumah tangga usaha, karakteristik petani dan penguasaan dan penggunaan lahan), struktur ongkos dan pendapatan rumah tangga usaha, keadaan sosial ekonomi rumah tangga usaha pertanian (ketenagakerjaan dan gender dan akses petani ke sumber daya produktif).

BAB III

ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA PALAWIJA

3.1. Profil Rumah Tangga Usaha Palawija

3.1.1. Distribusi Rumah Tangga Usaha Palawija

Total rumah tangga di Sumatera Utara tahun 2003 tercatat sebanyak 2.553.047 rumah tangga (Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2003). Jika dibandingkan dengan rumah tangga pertanian hasil Sensus Pertanian Tahun 2003 (ST03) maka hampir separuhnya atau sebanyak 1.262.421 rumah tangga merupakan rumah tangga pertanian. Dari total rumah tangga pertanian tersebut, sebanyak 31,27 persen atau 394.762 rumah tangga pertanian khusus menekuni usaha tanaman palawija.

Besarnya persentase rumah tangga usaha tanaman palawija di Sumatera Utara dapat dimengerti, karena di samping alamnya mendukung, juga tidak sedikit dari usaha tersebut merupakan usaha turun temurun baik lahan maupun ilmunya. Tanaman palawija dapat tumbuh hampir di sembarang tempat di Sumatera Utara dan dapat diusahakan oleh orang kebanyakan. Tanaman palawija yang diusahakan rumah tangga pertanian di Sumatera Utara antara lain jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, talas, ubi kayu dan ubi jalar.

Berdasarkan hasil ST03, jumlah rumah tangga usaha palawija tanaman jagung di Sumatera Utara sebanyak 37,91 persen, jumlah rumah tangga usaha palawija tanaman ubi kayu sebanyak 34,54 persen, jumlah rumah tangga usaha palawija tanaman ubi jalar sebanyak 15,13 persen, jumlah rumah tangga usaha palawija tanaman kacang tanah sebanyak 7,64 persen, jumlah rumah tangga usaha palawija tanaman kacang hijau sebanyak 2,40 persen dan jumlah rumah tangga usaha palawija tanaman kedelai sebanyak 1,79 persen.

3.1.2. Karakteristik Petani Palawija

Mengapa seseorang menekuni suatu kegiatan sering terkait dengan latar belakang, umur dan nilai lebih yang dimiliki sipelaku. Kecenderungan suatu kegiatan yang nilai ekonominya relatif tinggi membutuhkan kecakapan yang selalu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Jadi semakin sulit suatu kegiatan – *Sulit dalam arti membutuhkan dana, pengetahuan, keuletan dan ketelitian lebih* - biasanya nilai ekonominya relatif lebih tinggi dan pelakunnya pun semakin mengecil jumlahnya. Dari karakteristik yang mendominasi pelaku usaha dapat diduga nilai ekonomi dan tingkat kesulitan usaha dimaksud secara umum. Ada dua karakteristik pelaku usaha palawija yang ingin disoroti berdasarkan data yang terekam pada ST03 yaitu kelompok umur dan jenjang pendidikan yang sempat dilakoni.

Tabel 3.1. Persentase Petani Tanaman Palawija dan Buruh Usaha Tanaman Palawija Menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan

Kelompok Umur (Tahun)	Status Pekerjaan		Total
	Petani	Buruh Palawija	
(1)	(2)	(3)	(4)
10 – 14	0,72	5,47	0,99
15 – 19	1,59	9,16	2,02
20 – 24	3,24	17,54	4,07
25 – 29	7,05	15,27	7,52
30 – 34	10,66	14,04	10,86
35 – 39	12,92	8,67	12,67
40 – 44	14,47	9,51	14,19
45 – 49	13,42	7,99	13,11
50 – 54	12,87	3,69	12,34
55 – 59	7,60	3,01	7,33
60 – 64	6,24	2,90	6,05
≥ 65	9,22	2,75	8,85
T o t a l	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Kelompok umur pelaku usaha palawija yang tercatat dari ST03 terdistribusi dari kelompok umur 10 – 14 s/d kelompok umur di atas 65 tahun. Pola distribusi yang terbentuk menggambarkan pola dimana pada kelompok umur yang semakin tinggi jumlah pelaku usaha cenderung membesar dan menurun lagi pada kelompok umur tua.

Persentase pelaku usaha palawija pada kelompok umur 19 tahun ke bawah yaitu sebesar 3,01 persen. Pada kelompok umur 20 – 24 dan 25 – 29 persentasenya mulai cenderung membesar yakni 4,07 dan 7,52 persen. Selanjutnya kelompok umur 30 – 34 s/d 40 – 44 dengan persentase antara 10,86 persen s/d 14,19 persen, kemudian mengecil kembali mulai pada kelompok umur 45 – 49 tahun hingga kelompok umur 65 tahun keatas.

Tabel 3.2. Persentase Petani Palawija Menurut Jenjang Pendidikan Dan Status Pekerjaan

Tingkat Pendidikan	Status Pekerjaan		
	Petani	Buruh	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Sekolah	18,13	13,23	17,85
SD dan Setingkat	34,41	31,13	34,22
SLTP dan Setingkat	26,88	32,84	27,23
SLTU dan Setingkat	19,13	22,55	19,33
D1 dan D2	0,57	0,00	0,54
Akademi/D3	0,20	0,00	0,19
Universitas/D4	0,67	0,24	0,65
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Fenomena tersebut agaknya terkait dengan perubahan beban kebutuhan hidup, di mana pada kelompok umur 10 – 14 dan 15 – 19 tahun kebutuhan masih sebatas untuk diri sendiri. Pada kelompok umur 20 – 24 dan 25 – 29, merupakan kelompok umur rumah tangga muda yang memiliki antara satu atau dua orang anak balita. Sedangkan

pada kelompok umur 30 – 34 s/d 50 – 54, merupakan kelompok umur rumah tangga yang membutuhkan biaya untuk anak-anak sekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Dilihat dari jenjang pendidikan yang dilakoni rumah tangga usaha palawija, ternyata lebih dari separuh (52,07 persen) petani yang hanya tamatan sekolah dasar (SD) ke bawah. Sedangkan yang sempat mengecap pendidikan tinggi (D1 ke atas) hanya 1,38 persen dari total rumah tangga usaha palawija.

Ini artinya usaha palawija bukanlah kegiatan yang memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan paling tidak untuk saat ini dan bukan merupakan suatu pilihan. Adapun rumah tangga yang melakukannya saat ini patut diduga karena tidak memiliki pilihan lain. Jadi tidak heran kalau hingga saat ini usaha jenis ini masih kurang berkembang karena pelakunya kurang memiliki pandangan usaha ke depan.

3.1.3. Penguasaan dan Penggunaan Lahan

Mencermati alasan mengapa rumah tangga memilih menjadi petani jagung, ubi kayu, ubi jalar atau tanaman palawija lain, mungkin diperlukan penelitian khusus. Terkait dengan rata-rata tingkat pendidikan petani di Indonesia pada umumnya, sulit untuk mengemukakan argumen bahwa rumah tangga memilih bertani tanaman palawija karena memahami kebutuhan pasar lokal, karena kenyataannya produk tanaman palawija jenis ini masih banyak yang diimpor.

Umumnya, rumah tangga usaha tanaman palawija di Sumatera Utara masih termasuk kepada rumah tangga petani gurem. Hal ini ditunjukkan oleh 31,99 persen rumah tangga menguasai lahan dengan luas yang hanya mencapai < 0,50 Ha, disusul oleh 24,98 persen rumah tangga yang menguasai lahan dengan luas 1,00 – 1,99 Ha.

Bila dilihat lebih rinci lagi terhadap 31,99 persen rumah tangga yang menguasai luas lahan < 0,50 Ha, rumah tangga dengan lahan seluas 0,50 – 0,99 Ha mendominasi dengan persentase sebesar 17,19 persen, disusul oleh rumah tangga yang menguasai

lahan seluas 0,10 – 0,24 Ha sebanyak 9,03 persen dan rumah tangga yang menguasai lahan seluas < 0,10 Ha sebanyak 5,77 persen.

Tabel 3.3. Persentase Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Luas Lahan Yang dikuasai dan Diusahakan

Luas Lahan (Ha)	Lahan Dikuasai	Lahan Diusahakan
(1)	(2)	(3)
< 0,10	5,77	30,89
0,10 – 0,24	9,03	30,51
0,25 – 0,49	17,19	21,11
0,50 – 0,99	31,50	12,68
1,00 – 1,99	24,98	4,06
2,00 – 2,99	8,15	0,57
≥ 3,00	3,38	0,18

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Bila dilihat menurut luas lahan yang diusahakan, terdapat 82,51 persen rumah tangga usaha tanaman palawija yang mengusahakan lahan dengan luas < 0,50 Ha, yang didominasi oleh 30,89 persen rumah tangga usaha tanaman palawija yang mengusahakan lahan dengan luas < 0,10 Ha, disusul oleh 30,51 persen rumah tangga dengan luas lahan 0,10 – 0,24 Ha dan 21,11 persen rumah tangga dengan luas lahan 0,25 – 0,49 Ha.

3.2. Struktur Ongkos dan Pendapatan Rumah Tangga Usaha Palawija

3.2.1. Struktur Ongkos

Secara umum, seperti yang tercatat dalam ST03, ongkos-ongkos yang dibutuhkan untuk usaha tanaman palawija antara lain meliputi benih, pupuk, pestisida, sewa lahan, tenaga kerja, perontokan, pengangkutan dan pengeringan serta biaya

lainnya (sewa/pemeliharaan alat, pengelolaan lahan, pemupukan, pengendalian OPT, penyiangan, pemanenan).

Tabel 3.4. Persentase Ongkos Usaha Tanaman Palawija Menurut Jenis Pengeluaran

Struktur Ongkos	Distribusi (%)
(1)	(3)
1. Benih	10,31
2. Pupuk	22,58
3. Pestisida	3,50
4. Sewa Lahan	4,80
5. Tenaga Kerja	23,48
6. Lainnya	14,18
7. Perontokan	4,04
8. Pengangkutan	12,70
9. Pengeringan	4,41
Ongkos.Produksi	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Ragam besarnya ongkos produksi yang dikeluarkan rumah tangga usaha tanaman palawija membentuk komposisi yang dapat digunakan sebagai bahan analisis bagi pengambil kebijakan ataupun masyarakat yang berkepentingan. Secara umum, pengeluaran untuk upah tenaga kerja menempati urutan pertama sebesar 23,48 persen, disusul oleh pupuk sebesar 22,58 persen, pengeluaran lainnya sebesar 14,18 persen, pengangkutan sebesar 12,70 persen dan benih sebesar 10,31 persen. Sedangkan yang paling kecil persentasenya adalah biaya pengeringan sebesar 4,41 persen, perontokan sebesar 4,04 persen dan pengadaan pestisida sebesar 3,50 persen.

Untuk tanaman jagung, pengeluaran untuk tenaga kerja dan pupuk juga mengambil persentase terbesar, dimana untuk pupuk 27,81 persen dan tenaga kerja 22,67 persen. Pengeluaran lain yang cukup mengambil persentase yang cukup berarti

seperti kelompok pengeluaran lainnya 16,26 persen dan untuk benih 12,81 persen. Sedangkan pestisida merupakan pengeluaran yang paling kecil sebesar 2,11 persen.

Tanaman kacang tanah juga mengeluarkan ongkos untuk tenaga kerja dan pupuk dengan persentase paling terbesar yaitu 24,17 persen dan 22,82 persen. Selain itu, pengeluaran untuk benih juga mengambil persentase yang cukup berarti sebesar 15,31 persen. Sedangkan pengeluaran untuk perontokan mengambil persentase yang terkecil yaitu 3,94 persen.

Tabel 3.5. Persentase Ongkos Usaha Tanaman Palawija Menurut Jenis Ongkos dan Jenis Tanaman

Jenis Ongkos	Jenis Tanaman		
	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau
(1)	(3)	(5)	(7)
1. Benih	12,81	15,31	12,56
2. Pupuk	27,81	22,82	13,49
3. Pestisida	2,11	4,06	7,42
4. Sewa Lahan	4,28	8,21	4,18
5. Tenaga Kerja	22,67	24,17	12,77
6. Lainnya	16,26	9,25	7,78
7. Perontokan	3,44	3,94	5,98
8. Pengangkutan	6,78	4,95	18,98
9. Pengeringan	3,84	7,29	16,84
Total Ongkos	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Berbeda halnya dengan kedua tanaman sebelumnya yaitu jagung dan kacang tanah, pengeluaran-pengeluaran usaha tanaman kacang hijau seperti untuk pengeringan, pengangkutan, tenaga kerja, pupuk dan benih mengambil persentase pengeluaran terhadap total nilai produksi yang lebih merata. Yang paling tinggi persentase pengeluaran terhadap biaya produksi adalah untuk pengangkutan dan pengeringan masing-masing sebesar 18,98 persen dan 16,84 persen, setelah itu berturut-turut untuk

pupuk sebesar 13,49 persen, tenaga kerja sebesar 12,77 persen dan benih sebesar 12,56 persen. Pengeluaran untuk menyewa lahan mengambil persentase yang terkecil sebesar 4,18 persen.

Tanaman kedelai mengeluarkan ongkos untuk tenaga kerja dengan persentase paling besar yaitu sebesar 28,76 persen. Setelah itu pengangkutan dan kelompok pengeluaran lainnya sebesar 26,14 persen dan 13,31 persen.

Tanaman ubi jalar mengeluarkan ongkos untuk pupuk dengan persentase paling besar yaitu sebesar 39,21 persen. Setelah itu kelompok pengeluaran lainnya, untuk tenaga kerja dan pengangkutan mengambil persentase cukup berarti sebesar 20,94 persen, 18,07 persen dan 12,62 persen. Sedangkan untuk benih, rumah tangga tidak mengeluarkan biaya, hal ini kemungkinan disebabkan benih yang digunakan untuk penanaman berikutnya merupakan bagian dari tanaman yang sudah dipanen.

Lanjutan **Tabel 3.5.**

Jenis Ongkos	Jenis Tanaman		
	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
(1)	(9)	(11)	(13)
1. Benih	7,09	0,00	0,00
2. Pupuk	9,61	39,21	30,09
3. Pestisida	5,60	0,69	2,79
4. Sewa Lahan	2,69	6,81	10,49
5. Tenaga Kerja	28,76	18,07	24,21
6. Lainnya	13,31	20,94	12,34
7. Perontokan	4,28	1,65	7,00
8. Pengangkutan	26,14	12,62	12,69
9. Pengeringan	2,52	0,01	0,39
Total Ongkos	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Tanaman ubi kayu memiliki pola pengeluaran yang mirip dengan tanaman ubi jalar. Persentase pengeluaran terbesar untuk pembelian pupuk sebesar 30,09 persen dan tenaga kerja sebesar 24,21 persen. Pengeluaran lain yang cukup berarti seperti pengangkutan 12,69 persen, pengeluaran lainnya 12,34 dan untuk menyewa lahan 10,49 persen. Persentase pengeluaran terkecil terdapat pada kegiatan pengeringan yang hanya 0,39 persen dari total pengeluaran.

3.2.1. Struktur Pendapatan

Hasil Sensus Pertanian 2003 menggambarkan bahwa rumah tangga usaha tanaman palawija yang menyatakan lebih dari cukup pendapatan yang diperoleh dari usaha tanaman palawijanya hanya berkisar 1 – 4 persen. Pada kelompok luas lahan $\geq 10.000 \text{ m}^2$, rumah tangga yang menyatakan pendapatan yang diperoleh dari usaha tanaman palawijanya lebih dari cukup mencapai 3,67 persen dan 2,42 persen rumah tangga usaha tanaman palawija dengan luas lahan $7.500 - 9.999 \text{ m}^2$.

Tabel 3.6. Persentase Rumah Tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Kelompok Luas Lahan dan Kategori Pendapatan dari Usaha Palawija

Kelompok Luas lahan (m^2)	Kategori Pendapatan			
	Lebih dari cukup	Cukup	Kurang	Kurang Sekali
(1)	(2)		(3)	(4)
< 2.500	1,80	30,92	49,86	17,42
2.500 – 4.999	1,44	35,32	54,44	8,80
5.000 – 7.499	1,05	36,61	57,19	5,15
7.500 – 9.999	2,42	30,88	63,05	3,65
≥ 10.000	3,67	53,57	37,28	5,48

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan persentase rumah tangga yang menyatakan kurang dan cukup pendapatan yang diperoleh dari usaha tanaman palawija menempati urutan pertama dan

kedua. Pada kelompok luas lahan < 2.500 m², rumah tangga yang menyatakan kurang pendapatan yang diperoleh sebesar 49,86 persen dan yang menyatakan cukup sebesar 30,92 persen. Pada kelompok luas lahan 2.500 – 4.999 m², rumah tangga yang menyatakan kurang pendapatan yang diperoleh mendominasi sebesar 54,44 persen, disusul oleh mereka yang menyatakan cukup sebesar 35,32 persen. Demikian juga halnya dengan kelompok luas lahan 5.000 – 7.499 m², rumah tangga yang menyatakan kurang pendapatan yang diperoleh sebesar 57,19 persen dan yang menyatakan cukup sebesar 36,61 persen. Tetapi pada kelompok luas lahan 7.500 – 9.999 m², rumah tangga yang menyatakan kurang pendapatan yang diperoleh sebesar 63,05 persen dan yang menyatakan cukup sebesar 30,88 persen.

Tabel 3.7. Persentase Rumah Tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Sumbangan Pendapatan dari Usaha Tanaman Palawija

Jenis Tanaman	Sumbangan Pendapatan dari Usaha Palawija			
	< 25 %	25 - 50 %	51 - 75 %	> 75 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jagung	34,22	44,13	13,02	8,63
Kacang Tanah	56,25	37,93	3,20	2,63
Kacang Hijau	72,32	26,09	1,09	0,51
Kedelai	52,34	41,75	2,70	3,21
Talas	80,78	15,78	2,76	0,68
Ubi Jalar	74,36	23,94	1,32	0,38
Ubi Kayu	74,29	20,92	2,81	1,97
Lainnya	95,65	4,35	0	0

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Bila dilihat menurut jenis komoditi, umumnya rumah tangga usaha tanaman palawija berpendapat, umumnya pendapatan usaha tanaman palawija memberi sumbangan kepada pendapatan rumah tangga berada pada kelompok 25 persen, disusul oleh mereka yang menyatakan sumbangan pendapatan usaha tanaman palawija berada pada kelompok 25 – 50 persen.

Pada kelompok sumbangan pendapatan dari usaha palawija 51 – 75 persen, hanya 13,02 persen rumah tangga usaha tanaman jagung menyatakan pendapatan usaha palawija memberikan kontribusi kepada pendapatan sebesar 51 – 75 persen.

Pada kelompok sumbangan pendapatan usaha tanaman palawija kepada pendapatan rumah tangga > 75 persen, sekitar 8,63 persen rumah tangga usaha tanaman jagung, disusul oleh rumah tangga usaha tanaman palawija kedelai sebesar 3,21 persen dan tanaman kacang tanah sebesar 2,63 persen.

3.3.Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Palawija

3.3.1.Ketenagakerjaan dan Gender

Usaha tanaman palawija melibatkan pekerja dibayar dan pekerja tidak dibayar. Pekerja dibayar adalah pekerja yang terlibat di dalam usaha tanaman palawija dengan mendapatkan upah/gaji, sedangkan pekerja tidak dibayar umumnya adalah anggota keluarga/rumah tangga seperti istri dan anak-anak.

Tabel 3.8. Persentase Jumlah Pekerja pada Rumah Tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Status Pekerja, Jenis Kelamin dan Jenis Tanaman

Jenis Tanaman	Dibayar			Tidak Dibayar		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jagung	49,43	50,57	100,00	12,63	87,37	100,00
Kacang Tanah	33,58	66,42	100,00	19,93	80,07	100,00
Kacang Hijau	33,03	66,97	100,00	16,61	83,39	100,00
Kedelai	56,59	43,41	100,00	15,42	84,58	100,00
Talas	100,00	0,00	100,00	18,40	81,60	100,00
Ubi Jalar	41,46	58,54	100,00	18,83	81,17	100,00
Ubi Kayu	65,64	34,36	100,00	20,25	79,75	100,00
Lainnya	37,50	62,50	100,00	1,96	98,04	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pekerja pada usaha tanaman palawija baik pekerja dibayar maupun tidak dibayar, umumnya didominasi oleh pekerja perempuan dengan persentase yang mencapai 50,57 persen hingga 66,97 persen pada status pekerja dibayar dan 79,75 persen hingga 98,04 persen pada pekerja tidak dibayar kecuali pada usaha tanaman palawija kedelai dan ubi kayu.

Dalam melakukan pengelolaan usaha tanaman palawija, yang diawali dari penentuan jenis tanaman palawija yang ditanam, varitas benih yang ditanam, jenis dan banyak pupuk yang dipakai, jenis dan banyak pestisida yang dipakai, banyaknya uang untuk pembelian saprotan (sarana produksi pertanian) dan banyaknya produksi yang dijual, keputusan yang diambil umumnya ditentukan secara bersama-sama (laki-laki dan perempuan) dengan persentase yang mencapai pada masing-masing jenis keputusan lebih dari 50 persen.

Tabel 3.9. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Jenis Kegiatan dan Pengambil Keputusan dalam Rumah tangga

Jenis Kegiatan	Pengambil Keputusan		
	Laki-laki	Perempuan	Bersama-sama
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Tanaman Palawija yang Ditanam	23,82	24,00	52,18
Varitas benih yang ditanam	22,99	24,08	52,94
Jenis dan banyak Pupuk yang Dipakai	25,15	22,41	52,44
Jenis dan banyak pestisida yang dipakai	24,17	20,57	55,25
Banyaknya uang untuk pembelian saprotan	19,04	23,37	57,59
Banyaknya produksi yang dijual	13,69	26,86	59,45
Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga	7,12	54,99	37,88

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Walaupun masih dengan persentase yang kecil, tetapi peran perempuan lebih besar dari laki-laki dalam mengambil keputusan jenis tanaman palawija yang ditanam (24,00 persen berbanding 23,82 persen), varitas benih yang ditanam (24,08 persen berbanding 22,99 persen), banyaknya uang untuk pembelian saprotan (23,37 persen berbanding 19,04 persen) dan banyaknya produksi yang dijual (26,86 persen berbanding 13,69 persen). Dan mencapai puncaknya dalam keputusan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga yang mencapai 54,99 persen.

3.3.2. Akses Petani Palawija ke Sumber daya Produktif

Bila memperhatikan sumber modal yang digunakan rumah tangga dalam usaha tanaman palawija, hampir seluruh rumah tangga usaha tanaman palawija menggunakan modal sendiri. Sekitar 94,83 persen rumah tangga usaha tanaman palawija jagung menggunakan modal sendiri, usaha tanaman kacang tanah sebesar 96,37 persen rumah tangga, usaha tanaman kacang hijau sebesar 99,89 persen rumah tangga, dan tanaman kedelai sebesar 99,74 persen rumah tangga.

Tabel 3.10. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Pihak Yang Memberikan Kredit Terbesar dan Jenis Tanaman

Pihak Yang Memberikan Kredit Terbesar	Jenis Tanaman			
	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kedelai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Modal Sendiri	94,83	96,37	99,89	99,74
Kredit Bank	0,24	0,05	0,00	0,00
Kredit Non Bank	2,06	1,66	0,00	0,00
Lainnya	2,87	1,91	0,11	0,26

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada usaha tanaman palawija talas, sekitar 99,69 persen rumah tangga menggunakan modal sendiri, disusul oleh usaha tanaman ubi jalar sebesar 99,41 persen rumah tangga, usaha tanaman kacang hijau sebesar 96,54 persen rumah tangga, dan tanaman ubi kayu sebesar 96,54 persen rumah tangga.

Lanjutan Tabel 3.10.

Pihak Yang Memberikan Kredit Terbesar	Jenis Tanaman			
	Talas	Ubi Jalar	Ubi Kayu	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Modal Sendiri	99,69	99,41	96,54	100,00
Kredit Bank	0,00	0,00	0,04	0,00
Kredit Non Bank	0,00	0,21	0,31	0,00
Lainnya	0,31	0,39	3,11	0,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Masih besarnya persentase rumah tangga usaha tanaman palawija yang menggunakan modal sendiri dan hanya sedikit yang memanfaatkan sumber pembiayaan lain seperti Bank maupun non Bank, memberi gambaran awal bahwa usaha tanaman palawija yang dilakukan oleh rumah tangga pertanian masih merupakan usaha yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan belum dijadikan keseriusan untuk mengelolanya. Dan tidak hanya itu saja, keberadaan sumber pembiayaan di daerah yang sulit dijangkau oleh rumah tangga usaha tanaman palawija juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi rumah tangga usaha tanaman palawija dalam mengembangkan usahanya.

Memperhatikan teknologi yang digunakan oleh rumah tangga usaha tanaman palawija dalam memungut hasil panen, sebanyak 62,44 persen rumah tangga usaha tanaman palawija jagung menggunakan mesin perontok, disusul oleh 11,72 persen rumah tangga usaha tanaman kacang tanah, 2,87 persen rumah tangga usaha tanaman kacang hijau dan 24,58 persen rumah tangga usaha tanaman kedelai.

Pada usaha tanaman palawija jagung, sebanyak 6,79 persen rumah tangga yang merontokan hasil panen dengan dipukul, dengan cara banting/gebot sebesar 1,72 persen, dan tidak menggunakan alat sebesar 28,06 persen.

Pada usaha tanaman palawija kacang tanah, sebanyak 2,90 persen rumah tangga yang merontokan hasil panen dengan dipukul, dengan cara banting/gebot sebesar 2,40 persen, dan tidak menggunakan alat sebesar 80,51 persen.

Tabel 3.11. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Cara Perontokan Yang Utama dan Jenis Tanaman

Cara Perontokan Yang Utama	Jenis Tanaman			
	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kedelai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mesin Perontok	62,44	11,72	2,87	24,58
Banting//Gebot	1,72	2,40	5,57	4,20
Dipukul	6,79	2,90	31,77	43,87
Diinjak-injak	0,98	2,48	48,74	16,67
Tanpa Alat	28,06	80,51	11,04	10,67

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada usaha tanaman palawija kacang hijau, sebanyak 31,77 persen rumah tangga yang merontokan hasil panen dengan dipukul, dengan cara banting/gebot sebesar 5,57 persen, dan tidak menggunakan alat sebesar 11,04 persen.

Pada usaha tanaman palawija kedelai, sebanyak 43,87 persen rumah tangga yang merontokan hasil panen dengan dipukul, dengan cara banting/gebot sebesar 4,20 persen, dan tidak menggunakan alat sebesar 10,67 persen.

Terhadap kegiatan pengendalian Organik Pengganggu Tanaman (OPT), belum seluruh rumah tangga usaha tanaman palawija melakukan kegiatan tersebut yang disebabkan oleh berbagai alasan. ST03 mencatat ada 4 (empat) alasan utama yang menyebabkan rumah tangga usaha tanaman palawija tidak melakukan pengendalian

OPT yaitu tidak menguntungkan, harga pestisida mahal, sulit mendapatkan pestisida, dan lainnya.

Pada usaha tanaman palawija jagung, sekitar 17,36 persen rumah tangga menyatakan tidak menguntungkan melakukan kegiatan pengendalian OPT, disusul oleh 15,14 persen rumah tangga yang menyatakan alasan lainnya dan 4,45 persen menyatakan tidak menguntungkan.

Pada usaha tanaman palawija kacang tanah, sekitar 27,12 persen rumah tangga menyatakan harga pestisida mahal, disusul oleh 5,93 persen rumah tangga yang menyatakan alasan lainnya dan 3,93 persen menyatakan tidak menguntungkan.

Tabel 3.12. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Alasan Tidak Dilakukan Pengendalian OPT dan Jenis Tanaman

Alasan Tidak Dilakukan Pengendalian OPT	Jenis Tanaman			
	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kedelai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Menguntungkan	4,45	3,93	8,10	2,38
Harga Pestisida Mahal	17,36	27,12	12,31	0,57
Sulit Mendapatkan Pestisida	0,47	2,80	0,13	0,00
Lainnya	15,14	5,93	7,33	7,15
Melakukan Pengendalian OPT	62,59	60,21	72,13	89,90

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada usaha tanaman palawija kacang hijau, sekitar 12,31 persen rumah tangga menyatakan harga pestisida mahal, disusul oleh 8,10 persen rumah tangga yang menyatakan tidak menguntungkan dan yang menyatakan alasan lainnya sebesar 7,33 persen.

Pada usaha tanaman palawija kedelai, 89,90 persen rumah tangga melakukan pengendalian OPT, tingginya persentase rumah tangga yang melakukan kegiatan tersebut dimungkinkan sifat tanaman yang mudah terganggu oleh OPT.

Pada usaha tanaman palawija talas, persentase rumah tangga yang menyatakan kegiatan pengendalian OPT tidak dilakukan disebabkan harga pestisida mahal dan karena alasan lainnya sebesar 28,95 persen, disusul oleh 11,58 persen rumah tangga yang menyatakan tidak menguntungkan.

Pada usaha tanaman palawija ubi jalar, sekitar 49,07 persen rumah tangga menyatakan sulit mendapatkan pestisida, disusul oleh 16,93 persen rumah tangga yang menyatakan harga pestisida mahal.

Pada usaha tanaman palawija ubi kayu, sekitar 44,99 persen rumah tangga menyatakan alasan lainnya, disusul oleh 16,29 persen rumah tangga yang menyatakan alasan lainnya.

Lanjutan **Tabel 3.12.**

Penyebab Kesulitan Utama	Jenis Tanaman		
	Talas	Ubi Jalar	Ubi Kayu
(1)	(6)	(7)	(8)
Tidak Menguntungkan	11,58	5,31	9,34
Harga Pestisida Mahal	28,95	18,18	16,29
Sulit Mendapatkan Pestisida	10,53	49,07	9,31
Lainnya	28,95	16,93	44,99
Melakukan Pengendalian OPT	20,00	10,51	20,07

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Secara umum, rumah tangga usaha tanaman palawija memilih pedagang pengumpul sebagai tempat penjualan hasil panen, disusul oleh pasar dan lainnya. Sekitar 78,10 persen rumah tangga usaha tanaman palawija jagung memilih pedagang pengumpul sebagai tempat penjualan hasil panen, disusul oleh yang memilih pasar sebesar 14,47 persen dan lainnya sebesar 2,75 persen.

Rumah tangga usaha tanaman palawija kacang tanah memilih pedagang pengumpul sebagai tempat penjualan hasil panen sebesar 61,56 persen, disusul oleh yang memilih pasar sebesar 28,10 persen dan lainnya sebesar 4,49 persen.

Pada usaha tanaman palawija kacang hijau, sekitar 50,80 persen rumah tangga memilih pedagang pengumpul sebagai tempat penjualan hasil panen, disusul oleh yang memilih pasar sebesar 38,33 persen dan lainnya sebesar 6,23 persen.

Tabel 3.13. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Tempat Penjualan Hasil Panen dan Jenis Tanaman

Tempat Penjualan Hasil Panen	Jenis Tanaman			
	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kedelai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KUD/Koperasi Tani	0,11	0,19	0,00	0,00
Koperasi Lainnya	0,09	0,16	0,00	0,00
Pasar	14,47	28,10	38,33	20,04
Pedagang Pengumpul	78,10	61,56	50,80	69,42
Mitra Usaha	0,74	0,04	0,50	3,31
Lainnya	2,75	4,49	6,23	5,96
Tidak melakukan penjualan	3,74	5,47	4,14	1,27

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Rumah tangga usaha tanaman palawija kedelai memilih pedagang pengumpul sebagai tempat penjualan hasil panen sebesar 69,42 persen, disusul oleh yang memilih pasar sebesar 20,04 persen dan lainnya sebesar 5,96 persen.

Sekitar 37,14 persen rumah tangga usaha tanaman palawija talas memilih pasar sebagai tempat penjualan hasil panen, disusul oleh yang memilih pedagang pengumpul sebesar 33,85 persen dan lainnya sebesar 23,91 persen.

Rumah tangga usaha tanaman palawija ubi jalar juga memilih pasar sebagai tempat penjualan hasil panen sebesar 25,32 persen, disusul oleh yang memilih pedagang pengumpul sebesar 24,99 persen dan lainnya sebesar 14,99 persen.

Pada usaha tanaman palawija ubi kayu, sekitar 36,28 persen rumah tangga memilih pedagang pengumpul sebagai tempat penjualan hasil panen, disusul oleh yang memilih pasar sebesar 22,70 persen dan lainnya sebesar 14,66 persen.

Lanjutan Tabel 3.13.

Tempat Penjualan Hasil Panen (1)	Jenis Tanaman			
	Talas (6)	Ubi Jalar (7)	Ubi Kayu (8)	Lainnya (9)
KUD/Koperasi Tani	0,94	0,03	0,31	0,00
Koperasi Lainnya	0,00	0,40	0,13	0,00
Pasar	37,14	25,32	22,70	4,35
Pedagang Pengumpul	33,85	24,99	36,28	2,17
Mitra Usaha	0,00	0,20	1,67	0,00
Lainnya	23,91	14,99	14,66	0,00
Tidak melakukan penjualan	4,17	34,07	24,26	93,48

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Disamping itu, bila dilihat menurut penyebab kesulitan utama terhadap penjualan hasil usaha tanaman palawija, sebagian besar rumah tangga usaha tanaman palawija menyatakan tidak ada masalah dengan penjualan hasil usaha tanaman palawija.

Sekitar 27,12 persen rumah tangga usaha tanaman palawija jagung menyatakan harga rendah merupakan penyebab kesulitan utama hasil usaha untuk dijual, disusul oleh 2,61 persen rumah tangga yang menyatakan kualitas rendah dan lainnya sebesar 1,15 persen.

Pada usaha tanaman palawija kacang tanah, sebanyak 26,63 persen rumah tangga juga menyatakan harga rendah sebagai penyebab utama kesulitan menjual hasil usaha, disusul oleh sarana angkutan yang terbatas sebesar 5,28 persen dan kualitas rendah sebesar 3,17 persen.

Tabel 3.14. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Penyebab Kesulitan Utama Untuk Dijual

Penyebab Kesulitan Utama	Jenis Tanaman			
	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kedelai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sarana Angkutan Terbatas	2,05	5,28	0,78	1,95
Kualitas Rendah	2,61	3,17	1,63	0,59
Produksi Melimpah	0,22	1,63	0,63	0,04
Harga Rendah	27,12	26,63	29,89	12,77
Lainnya	1,15	1,57	0,93	1,00
Tidak Ada Masalah	66,85	61,72	66,14	83,64

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada usaha tanaman palawija kacang hijau, sebanyak 29,89 persen rumah tangga menyatakan harga rendah sebagai penyebab utama kesulitan menjual hasil usaha dan kualitas rendah sebesar 3,17 persen.

Pada usaha tanaman palawija kedelai, sebanyak 12,77 persen rumah tangga menyatakan harga rendah sebagai penyebab utama kesulitan menjual hasil usaha dan sarana angkutan terbatas sebesar 1,95 persen.

Pada usaha tanaman palawija talas, sebanyak 29,58 persen rumah tangga menyatakan harga rendah sebagai penyebab utama kesulitan menjual hasil usaha dan sarana angkutan terbatas sebesar 6,09 persen.

Pada usaha tanaman palawija ubi jalar, sebanyak 25,98 persen rumah tangga menyatakan harga rendah sebagai penyebab utama kesulitan menjual hasil usaha dan sarana angkutan terbatas sebesar 3,17 persen.

Pada usaha tanaman palawija ubi kayu, sebanyak 26,25 persen rumah tangga menyatakan harga rendah sebagai penyebab utama kesulitan menjual hasil usaha dan sarana angkutan terbatas sebesar 4,94 persen.

Lanjutan Tabel 3.14.

Penyebab Kesulitan Utama	Jenis Tanaman			
	Talas	Ubi Jalar	Ubi Kayu	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sarana Angkutan Terbatas	6,09	2,85	4,94	0,00
Kualitas Rendah	2,81	0,41	0,79	2,17
Produksi Melimpah	0,00	1,10	0,54	0,00
Harga Rendah	29,58	25,98	26,25	2,17
Lainnya	2,40	1,11	1,48	0,00
Tidak Ada Masalah	59,11	68,55	66,00	95,65

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Kebutuhan akan mitra usaha tidak terkecuali pada usaha tanaman palawija, merupakan keharusan dalam melakukan usaha. Seringkali kesadaran akan kebutuhan dimaksud terkait dengan kualitas si pelaku, ditambah lagi akses keluar masuk ke kampung atau dusun dimana umumnya tempat tinggal rumah tangga petani adalah daerah yang sulit dijangkau.

Tabel 3.15. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Alasan Utama Tidak menjadi Anggota KUD

Uraian	Persentase
(1)	(2)
Belum ada Koperasi	49,49
Lokasi KUD jauh	8,95
Pelayanan tidak memuaskan	10,25
Lainnya	31,31
Jumlah	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Dengan aparat yang terbatas, pemerintah belum mampu menjangkau sampai ke pelosok kampung. ST03 mencatat di Sumatera Utara, rumah tangga usaha tanaman palawija yang tidak menjadi anggota KUD mencapai 49,49 persen dan tidak menjadi anggota kelompok tani sebesar 61,29 persen, yang disebabkan karena tidak adanya kedua institusi tersebut di daerahnya.

Terhadap keengganan menjadi anggota KUD, 31,31 persen rumah tangga menyatakan alasan lainnya, 10,25 persen rumah tangga menyatakan pelayanan tidak memuaskan dan hanya 8,95 persen rumah tangga yang menyatakan lokasi KUD jauh.

Tabel 3.16. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija menurut Alasan Utama Tidak menjadi Anggota Kelompok Tani

Uraian (1)	Persentase (2)
Tidak ada kelompok tani	61,29
Tidak bermanfaat	7,98
Lainnya	30,73
Jumlah	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Terhadap keengganan menjadi anggota kelompok tani, sekitar 30,73 persen rumah tangga usaha tanaman palawija menyatakan dikarenakan alasan lainnya dan yang menyatakan tidak bermanfaat hanya mencapai 7,98 persen.

Walaupun sudah menjadi anggota KUD/Koperasi Tani, 41,81 persen rumah tangga usaha tanaman palawija menyatakan masalah utama rumah tangga usaha tanaman palawija adalah harga produksi yang rendah. Disusul oleh rumah tangga yang menghadapi masalah utama berupa kekurangan modal sebesar 30,62 persen dan masalah utama lainnya sebesar 17,18 persen. Sedangkan bagi yang tidak menjadi anggota KUD/Koperasi Tani, rumah tangga yang menghadapi masalah harga produksi rendah hanya mencapai 35,13 persen dan kekurangan modal sebesar 34,79 persen serta masalah lainnya sebesar 21,13 persen.

Tabel 3.17. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Jenis Keanggotaan dan Masalah Utama Yang Dihadapi

Masalah Utama Yang Dihadapi	Anggota KUD/Koperasi Tani	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
Kekurangan Modal	30,62	34,79
Harga Saprotan Mahal	5,99	5,54
Kelangkaan Saprotan	2,89	0,24
Harga Produksi Rendah	41,81	35,13
Hama Penyakit	1,50	3,17
Lainnya	17,18	21,13

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Demikian juga halnya dengan rumah tangga usaha tanaman palawija yang terlibat dalam penyuluhan usaha palawija, 30,86 persen rumah tangga menyatakan masalah utama rumah tangga usaha tanaman palawija adalah harga produksi yang rendah. Disusul oleh rumah tangga yang menghadapi masalah utama berupa kekurangan modal sebesar 28,62 persen dan yang menghadapi masalah utama berupa harga saprotan mahal sebesar 21,45 persen.

Tabel 3.18. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Jenis Keanggotaan dan Masalah Utama Yang Dihadapi

Masalah Utama Yang Dihadapi	Penyuluhan Usaha Palawija	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
Kekurangan Modal	28,62	34,88
Harga Saprotan Mahal	21,45	5,10
Kelangkaan Saprotan	1,00	0,27
Harga Produksi Rendah	30,86	35,38
Hama Penyakit	1,86	3,17
Lainnya	16,21	21,19

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan bagi yang tidak ikut dalam penyuluhan usaha palawija, masalah utama yang dihadapi rumah tangga adalah harga produksi rendah yang mencapai 35,38 persen dan kekurangan modal sebesar 34,88 persen serta masalah lainnya sebesar 21,19 persen.

Tabel 3.19. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Palawija Menurut Jenis Keanggotaan dan Masalah Utama Yang Dihadapi

Masalah Utama Yang Dihadapi	Kelompok Tani	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
Kekurangan Modal	21,90	35,19
Harga Saprotan Mahal	13,76	5,24
Kelangkaan Saprotan	3,48	0,17
Harga Produksi Rendah	39,67	35,09
Hama Penyakit	3,25	3,13
Lainnya	17,94	21,17

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Terhadap rumah tangga usaha tanaman palawija yang menjadi anggota kelompok tani, 39,67 persen rumah tangga menyatakan masalah utama rumah tangga usaha tanaman palawija adalah harga produksi yang rendah. Disusul oleh rumah tangga yang menghadapi masalah utama berupa kekurangan modal sebesar 21,90 persen dan yang menghadapi masalah utama berupa harga saprotan mahal sebesar 13,76 persen. Sedangkan bagi yang tidak ikut sebagai anggota kelompok tani, kekurangan modal dan harga produksi yang rendah menjadi dua masalah utama yang dihadapi dengan persentase masing-masing yang mencapai 35,19 persen dan 35,09 persen.

BAB IV

ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA PERKEBUNAN

4.1. Profil Rumah Tangga Usaha Perkebunan

4.1.1. Distribusi Rumah Tangga Usaha Perkebunan

Rumah tangga usaha perkebunan di Sumatera Utara berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2003 sebanyak 591.609 rumahtangga. Daerah ini memiliki kontribusi terbesar yaitu 9,06 persen dari total rumah tangga usaha perkebunan di Indonesia (6.528.924 rumah tangga). Jenis tanaman perkebunan yang diusahakan rumah tangga antara lain aren/enu, cengkeh, gambir, kakao, karet, kayu manis, kelapa sawit, kelapa, kemenyan, kemiri, kopi, nilam, pinang dan tembakau.

Tabel 4.1. Persentase Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Menurut Jenis Tanaman

Jenis Tanaman (1)	Persentase (2)
1. Aren/Enau	0,24
2. Cengkeh	0,28
3. G a m b i r	0,16
4. K a k a o	8,99
5. K a r e t	35,14
6. Kayu Manis	0,08
7. Kelapa Sawit	22,19
8. K e l a p a	6,94
9. Kemenyan	1,09
10. K e m i r i	1,87
11. K o p i	21,40
12. N i l a m	0,52
13. P i n a n g	0,31
14. Tembakau	0,24
15. Tanaman Tahunan Lainnya	0,40
16. Tanaman Semusim Lainnya	0,13
Total	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Jenis tanaman yang banyak diusahakan rumah tangga perkebunan antara lain karet, kelapa sawit dan kopi masing-masing sebesar 35,14 persen, 22,19 persen dan 21,40 persen. Selain ketiga jenis tanaman tersebut kakao dan kelapa juga diusahakan rumah tangga dengan jumlah cukup berarti yaitu 8,99 persen dan 6,93 persen. Selebihnya hanya diusahakan kurang dari 2 persen rumah tangga.

4.1.2. Karakteristik Pekebun

Jumlah pekebun di Sumatera Utara yang tercatat pada ST03 sebanyak 692.146 orang, dari kelompok usia 10 - 14 tahun s/d kelompok umur 60 tahun ke atas. Pelaku terbanyak pada kelompok usia 35 – 44 tahun dan 45 – 54 tahun dengan persentase masing-masing 27,08 persen dan 26,02 persen.

Tabel 4.2. Persentase Jumlah Pekebun Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur (Tahun)	Persentase
(1)	(2)
10 – 14	0,20
15 – 19	1,20
20 – 24	3,13
25 – 34	16,11
35 – 44	27,08
45 – 54	26,02
55 – 60	10,97
60 +	15,30
Jumlah	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Kelompok usia yang kontribusinya cukup berarti yaitu kelompok usia 25 – 34 tahun (16,11 persen), di atas 60 tahun (15,30 persen) dan 55 – 60 tahun (10,97 persen).

Walaupun kontribusi sangat kecil tetapi ada pekebun yang seharusnya sedang sekolah yaitu kelompok usia 10 – 14 tahun dan 15 – 19 tahun.

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, pekebun didominasi oleh mereka dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD/setara dan SLTP/setara masing-masing sebesar 36,15 persen dan 25,62 persen. Pekebun yang tidak sekolah dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan SLTA/setara juga memiliki kontribusi yang cukup berarti sebesar 17,14 persen dan 19,81 persen. Pekebun dengan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan Diploma 1 (D1) ke atas hanya 1,28 persen dari total pekebun.

Tabel 4.3. Persentase Jumlah Pekebun Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Pendidikan Yang Ditamatkan	Persentase
(1)	(2)
Belum/Tidak Punya	17,14
SD/Setara	36,15
SLTP /Setara	25,62
SLTA / Setara	19,81
D1/D2	0,49
Akademi/D3	0,20
Universitas/D4	0,59
Jumlah	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

4.1.3. Penguasaan dan Penggunaan Lahan

Lahan merupakan bagian terpenting dari usaha tanaman perkebunan. Penguasaan lahan dapat mencerminkan kemampuan rumah tangga usaha tanaman perkebunan dalam melakukan pengelolaan usaha dan peningkatan hasil perkebunannya. Penguasaan lahan meliputi lahan milik sendiri, ataupun lahan yang bersifat pinjaman ataupun diperoleh dari pihak lain untuk digunakan sebagai lahan bagi usaha tanaman perkebunan.

Hasil ST03 mencatat banyaknya rumah tangga usaha perkebunan menurut penguasaan lahan, didominasi oleh rumah tangga dengan penguasaan lahan antara 10.000 – 19.999 m² dan 5.000 – 9.999 m² dengan persentase masing-masing mencapai 32,28 persen dan 24,49 persen. Sementara rumah tangga usaha tanaman perkebunan yang hanya menguasai lahan kurang dari 1.000 m² persentasenya tidak sampai 1 persen dan rumah tangga usaha tanaman perkebunan yang mampu menguasai lahan lebih dari 30.000 m² sebesar 11,55 persen dari total rumah tangga usaha tanaman perkebunan.

Tabel 4.4. Persentase Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Menurut Golongan Luas Lahan Yang dikuasai dan Diusahakan

Golongan Luas Lahan (m²)	Rumah Tangga Yang Menguasai	Rumah Tangga Yang Mengusahakan
(1)	(2)	(3)
< 1.000	0,98	5,39
1.000 – 4.999	14,12	30,61
5.000 – 9.999	24,49	21,29
10.000 – 19.999	32,28	24,03
20.000 – 29.999	16,58	12,49
≥ 30.000	11,55	6,19
T o t a l	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Total pengusahaan lahan didominasi oleh rumah tangga usaha perkebunan dengan luas lahan antara 1.000 – 4.999 m² dengan persentase 30,61 persen. Rumah tangga dengan luas lahan yang diusahakan antara 5.000 – 9.999 m² dan 100.000 – 19.999 m² juga memiliki persentase yang cukup berarti yaitu 21,29 persen dan 24,03 persen. sedangkan yang mampu mengusahakan di atas 30.000 m² hanya 6,19 persen dari total rumah tangga usaha perkebunan.

4.2. Struktur Ongkos dan Pendapatan Rumah Tangga Usaha Perkebunan

4.2.1. Struktur Ongkos

Ongkos-ongkos yang dikeluarkan pelaku usaha perkebunan yang tercatat dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2003 (ST03) meliputi bibit dan penyisipan, tanaman pelindung, pupuk, pestisida, dan stimulant. Upah pekerja dan biaya-biaya lainnya dari sewa traktor s/d biaya restribusi dan pungutan-pungutan.

Pada usaha tanaman perkebunan aren, hasil ST03 mencatat, struktur ongkos produksi hanya meliputi pupuk dan pengeluaran lainnya. Pengeluaran lainnya mencapai 6,97 persen dan pengeluaran untuk pupuk sebesar 0,07 persen.

Pada usaha tanaman perkebunan cengkeh, pengeluaran untuk pupuk, pestisida, upah pekerja dibayar/buruh dan pengeluaran lainnya mendominasi struktur pengeluaran produksi. Pengeluaran pupuk mencapai 0,28 persen, untuk pestisida sebesar 0,03 persen, upah pekerja dibayar/buruh sebesar 4,09 persen dan pengeluaran lainnya sebesar 4,33 persen.

Tabel 4.5. Persentase Pengeluaran per 100 Pohon/Ha dari Usaha Perkebunan

Jenis Pengeluaran	Jenis Tanaman			
	Aren	Cengkeh	Gambir	Kakao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bibit dan Penyisipan	0,00	0,00	0,00	0,54
2. Tanaman Pelindung	0,00	0,00	0,00	0,07
3. Pupuk	0,07	0,28	0,69	6,31
4. Pestisida	0,00	0,03	5,20	0,85
5. Stimulan	0,00	0,00	0,00	0,03
6. Upah Pekerja Dibayar/Buruh	0,00	4,09	2,79	2,96
7. Pengeluaran Lainnya	6,97	4,33	6,80	5,08
Total	7,04	8,73	15,47	15,83

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada usaha tanaman perkebunan kakao, struktur ongkos produksi meliputi bibit dan penyisipan, tanaman pelindung, pupuk, pestisida, stimulan, upah pekerja dibayar/buruh dan pengeluaran lainnya. Pengeluaran pupuk menempati urutan pertama dengan persentase yang mencapai 6,31 persen, disusul oleh pengeluaran lainnya sebesar 5,08 persen dan pengeluaran upah pekerja dibayar/buruh sebesar 2,96 persen.

Pada usaha tanaman perkebunan karet, pengeluaran lainnya menempati urutan pertama dengan persentase yang mencapai 3,21 persen, disusul oleh pengeluaran upah pekerja dibayar/buruh sebesar 1,94 persen, dan pengeluaran pupuk sebesar 1,58 persen.

Pada usaha tanaman perkebunan kayu manis, struktur ongkos produksi hanya meliputi upah pekerja dibayar/buruh yang mencapai 7,00 persen dan pengeluaran lainnya sebesar 1,60 persen.

Lanjutan **Tabel 4.5.**

Jenis Pengeluaran (1)	Jenis Tanaman			
	Karet (6)	Kayu Manis (7)	Kelapa Sawit (8)	Kelapa (9)
1. Bibit dan Penyisipan	0,15	0,00	0,10	0,02
2. Tanaman Pelindung	0,00	0,00	0,02	0,02
3. Pupuk	1,58	0,00	9,25	0,71
4. Pestisida	0,13	0,00	0,58	0,11
5. Stimulan	0,00	0,00	0,01	0,00
6. Upah Pekerja Dibayar/Buruh	1,94	7,00	4,87	13,47
7. Pengeluaran Lainnya	3,21	1,60	4,54	4,24
T o t a l	7,01	8,60	19,38	18,57

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada usaha tanaman perkebunan kelapa sawit, pengeluaran pupuk menempati urutan pertama dengan persentase yang mencapai 9,25 persen, disusul oleh pengeluaran upah pekerja dibayar/buruh sebesar 4,87 persen, dan pengeluaran lainnya sebesar 4,54 persen.

Pada usaha tanaman perkebunan kelapa, struktur ongkos produksi didominasi oleh pengeluaran upah pekerja dibayar/buruh dengan persentase yang mencapai 13,47 persen dan pengeluaran lainnya sebesar 4,24 persen.

Pada usaha tanaman perkebunan kemenyan, struktur ongkos produksi didominasi oleh pengeluaran upah pekerja dibayar/buruh dengan persentase yang mencapai 6,79 persen dan pengeluaran lainnya sebesar 2,74 persen.

Demikian juga halnya dengan usaha tanaman perkebunan kemiri. Struktur ongkos produksi didominasi oleh pengeluaran upah pekerja dibayar/buruh dengan persentase yang mencapai 6,08 persen dan pengeluaran lainnya sebesar 5,62 persen.

Lanjutan **Tabel 4.5.**

Jenis Pengeluaran (1)	Jenis Tanaman			
	Kemenyan (10)	Kemiri (11)	Kopi (12)	Nilam (13)
8. Bibit dan Penyisipan	0,00	0,02	0,08	5,32
9. Tanaman Pelindung	0,00	0,00	0,07	0,02
10. Pupuk	0,07	0,04	8,10	1,91
11. Pestisida	0,00	1,56	0,40	0,21
12. Stimulan	0,00	0,00	0,01	0,07
13. Upah Pekerja Dibayar/Buruh	6,79	6,08	5,35	2,26
14. Pengeluaran Lainnya	2,74	5,62	3,38	2,86
Total	9,60	13,31	17,40	12,65

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada usaha tanaman perkebunan kopi, struktur ongkos produksi didominasi oleh pengeluaran pupuk dengan persentase yang mencapai 8,10 persen, pengeluaran upah pekerja dibayar/buruh sebesar 5,35 persen dan pengeluaran lainnya sebesar 3,38 persen.

Pada usaha tanaman perkebunan nilam, struktur ongkos produksi didominasi oleh pengeluaran bibit dan penyisipan dengan persentase yang mencapai 5,32 persen,

pengeluaran lainnya sebesar 2,86 persen, pengeluaran upah pekerja dibayar/buruh sebesar 2,26 persen dan pengeluaran pupuk sebesar 1,91 persen.

Pada usaha tanaman perkebunan pinang, struktur ongkos produksi didominasi oleh pengeluaran pupuk dengan persentase yang mencapai 9,50 persen, pengeluaran upah pekerja dibayar/buruh sebesar 6,01 persen dan pengeluaran lainnya sebesar 5,34 persen.

Pada usaha tanaman perkebunan tembakau, struktur ongkos produksi didominasi oleh pengeluaran lainnya dengan persentase yang mencapai 12,00 persen, pengeluaran upah pekerja dibayar/buruh sebesar 10,28 persen dan pengeluaran pupuk sebesar 7,34 persen.

Lanjutan **Tabel 4.5.**

Jenis Pengeluaran	Jenis Tanaman			
	Pinang	Tembakau	Tanaman Tahunan Lainnya	Tanaman Musiman Lainnya
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)
15. Bibit dan Penyisipan	0,08	2,12	3,15	0,03
16. Tanaman Pelindung	0,00	0,00	0,31	0,00
17. Pupuk	9,50	7,34	1,67	2,30
18. Pestisida	0,99	2,08	0,15	0,02
19. Stimulan	0,16	0,00	0,00	0,00
20. Upah Pekerja Dibayar/Buruh	6,01	10,28	2,36	6,63
21. Pengeluaran Lainnya	5,34	12,00	2,70	1,31
Total	22,08	33,83	10,33	10,28

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada usaha tanaman perkebunan tahunan lainnya, struktur ongkos produksi didominasi oleh pengeluaran bibit dan penyisipan dengan persentase yang mencapai 3,15 persen, pengeluaran lainnya sebesar 2,70 persen dan pengeluaran upah pekerja dibayar/buruh sebesar 2,36 persen.

Pada usaha tanaman perkebunan musiman lainnya, struktur ongkos produksi didominasi oleh pengeluaran upah pekerja dibayar/buruh dengan persentase yang mencapai 6,63 persen, pengeluaran pupuk sebesar 2,30 persen dan pengeluaran lainnya sebesar 1,31 persen.

4.2.2. Struktur Pendapatan

Dilihat dari sumber pendapatan utama rumah tangga usaha tanaman perkebunan yang dibedakan status pekerjaan atas buruh dan petani/memiliki usaha tanaman perkebunan, dapat dikatakan hampir seluruh rumah tangga usaha tanaman perkebunan merupakan petani/memiliki usaha tanaman perkebunan.

Tabel 4.6. Persentase Rumah tangga Usaha Perkebunan Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Status Pekerjaan

Sumber Pendapatan Utama	Status Pekerjaan	
	Buruh	Petani
(1)	(2)	(3)
Tanaman Perkebunan Terpilih	0,42	99,58
Tanaman Perkebunan Lainnya	14,98	85,02
Padi	2,33	97,67
Palawija	3,17	96,83
Hortikultura	2,09	97,91
Peternakan	0,00	100,00
Perikanan	14,21	85,79
Kehutanan	82,25	17,75
Jasa Pertanian	75,76	24,24
Pengambilan Bahan Galian	63,75	36,25
Industri Pengolahan	28,96	71,04
Perdagangan	2,98	97,02
Pengangkutan	46,47	53,53
Sektor Lainnya	74,19	25,81
Pendapatan/penerimaan Lain	99,79	0,21
Total	8,85	91,15

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Secara total, persentase rumah tangga usaha tanaman perkebunan yang merupakan petani mencapai 91,15 persen dan sisanya 8,85 persen merupakan buruh. Pada sumber pendapatan utama tanaman kehutanan, jasa pertanian, pengambilan bahan galian, sektor lainnya dan pendapatan/penerimaan lain, umumnya rumah tangga perkebunan merupakan buruh.

Pada kelompok luas lahan < 0,5 Ha yang diusahakan untuk perkebunan, sebanyak 59,04 persen rumah tangga usaha tanaman perkebunan menyatakan kurang pendapatan yang diperoleh dari usaha tanaman perkebunan, sebanyak 26,03 persen rumah tangga usaha tanaman perkebunan menyatakan cukup pendapatan yang diperoleh dan rumah tangga usaha tanaman perkebunan yang menyatakan lebih dari cukup hanya mencapai 1,35 persen.

Pada kelompok luas lahan 0,5 – 0,9 Ha, sebanyak 52,36 persen rumah tangga menyatakan kurang pendapatan yang diperoleh dari usaha tanaman perkebunan, sebanyak 40,00 persen rumah tangga menyatakan cukup pendapatan yang diperoleh dan yang menyatakan lebih dari cukup mencapai 2,45 persen.

Tabel 4.7. Persentase Rumah tangga Usaha Perkebunan Menurut Luas Lahan Yang Diusahakan untuk Perkebunan dan Kategori Pendapatan dari Usaha Perkebunan

Luas Lahan Yang Diusahakan Untuk Perkebunan (Ha)	Kategori Pendapatan			
	Lebih dari Cukup	Cukup	Kurang	Kurang Sekali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 0,5	1,35	26,03	59,04	13,59
0,5 – 0,9	2,45	40,00	52,36	5,19
1,0 – 1,9	2,24	46,65	47,52	3,60
2,0 – 2,9	4,05	62,29	30,51	3,15
> 3,0	10,51	69,01	19,11	1,37

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada kelompok luas lahan 1,0 – 1,9 Ha, sebanyak 47,52 persen rumah tangga menyatakan kurang, sebanyak 46,65 persen rumah tangga menyatakan cukup dan rumah tangga yang menyatakan lebih dari cukup mencapai 2,24 persen.

Pada kelompok luas lahan 2,0 – 2,9 Ha, sebanyak 62,29 persen rumah tangga menyatakan cukup, sebanyak 30,51 persen rumah tangga menyatakan kurang dan rumah tangga yang menyatakan lebih dari cukup mencapai 4,05 persen.

Pada kelompok luas lahan > 3,0 Ha, sebanyak 69,01 persen rumah tangga menyatakan cukup pendapatan yang diperoleh dari usaha tanaman perkebunan, sebanyak 19,11 persen rumah tangga menyatakan kurang pendapatan yang diperoleh dan rumah tangga yang menyatakan lebih dari cukup mencapai 10,51 persen.

Tabel 4.8. Persentase Rumah Tangga Usaha Perkebunan Menurut Sumbangan Pendapatan dari Usaha Perkebunan

Jenis Tanaman	Sumbangan Pendapatan dari Usaha Perkebunan				
	< 25 %	25 – 49 %	50 - 74 %	75 – 99 %	100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aren	9,5	3,64	31,93	18,5	36,43
Cengkeh	53,02	30,16	16,83	0,00	0,00
Gambir	3,43	16,08	80,49	0,00	0,00
Kakao	27,26	33,88	26,97	10,56	1,33
Karet	10,22	14,62	34,65	27,99	12,52
Kayu Manis	50,31	32,58	17,11	0,00	0,00
Kelapa Sawit	15,54	16,28	30,13	28,27	9,79
Kelapa	26,93	34	27,22	9,56	2,3
Kemenyan	3,45	35,07	44,93	15,24	1,31
Kemiri	15,79	44,35	24,82	14,53	0,51
Kopi	20,84	36,79	32,04	9,68	0,66
Nilam	35,33	46,83	9,98	7,28	0,58
Pinang	58,22	31,74	5,75	3,01	1,29
Tembakau	3,63	21,58	67,11	7,68	0,00
Tanaman Tahunan	40,5	23,33	10,99	3,48	21,7
Tanaman Musiman	42,61	3,88	19,3	34,21	0,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Bila ditanyakan tentang sumbangan yang diberikan usaha tanaman perkebunan terhadap pendapatan rumah tangga, 58,22 persen rumah tangga usaha tanaman pinang menyatakan usaha tanaman pinang hanya memberi sumbangan terhadap pendapatan sebesar < 25 %, disusul oleh usaha tanaman cengkeh sebesar 53,02 persen rumah tangga dan usaha tanaman kayu manis sebesar 50,31 persen.

Sekitar 80,49 persen rumah tangga usaha tanaman gambir menyatakan usaha tanaman gambir mampu memberi sumbangan terhadap pendapatan usaha berkisar 50 – 74 %, disusul oleh usaha tanaman tembakau sebesar 67,11 persen.

4.3. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Perkebunan

4.3.1. Ketenagakerjaan dan Gender

Bila dibedakan menurut jenis kelamin, perempuan yang terlibat didalam kegiatan usaha tanaman perkebunan hanya mencapai 21,63 persen dari 692.146 petani yang terlibat didalamnya.

Tabel 4.9. Persentase Petani Usaha Tanaman Perkebunan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (Tahun)	Petani		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
10 – 14	0,13	0,45	0,20
15 – 19	0,82	2,59	1,20
20 – 24	2,72	4,61	3,13
25 – 34	16,71	13,93	16,11
35 – 44	28,77	20,93	27,08
45 – 54	26,10	25,71	26,02
55 – 60	10,25	13,55	10,97
> 60	14,49	18,24	15,30
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada kelompok usia 35 – 44 tahun, 28,77 persen laki-laki menempati urutan pertama, disusul oleh mereka yang berada pada kelompok umur 45 – 54 tahun sebesar 26,10 persen, dan kelompok umur 25 – 34 tahun sebesar 16,71 persen. Sedangkan pada perempuan, sebanyak 25,71 persen perempuan yang berusia pada kelompok umur 45 – 54 tahun menempati urutan pertama, disusul oleh kelompok umur 35 – 44 tahun sebesar 20,93 persen dan mereka yang berada pada usia 60 tahun ke atas sebesar 18,24 persen.

Tabel 4.10. Persentase Petani Usaha Tanaman Perkebunan Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Petani Usaha Tanaman Perkebunan		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum/tidak punya	14,35	27,26	17,14
SD/setara	35,17	39,70	36,15
SLTP/setara	26,86	21,15	25,62
SMU/setara	22,18	11,23	19,81
D1/D2	0,56	0,23	0,49
Akademi/D3	0,21	0,15	0,20
Universitas/D4	0,67	0,28	0,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Bila dilihat menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, petani usaha tanaman perkebunan baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat pendidikan yang sama. Petani usaha tanaman perkebunan dengan tingkat pendidikan SD/setara baik laki-laki maupun perempuan menempati urutan pertama dengan 35,17 persen dan 39,70 persen. Disusul oleh mereka yang berpendidikan SLTP/setara masing-masing sebesar 26,86 persen dan 21,15 persen. Dan tingkat pendidikan SMU menempati urutan terakhir dengan 22,18 persen pada petani usaha tanaman perkebunan laki-laki dan 11,23 persen perempuan. Sedangkan petani usaha tanaman perkebunan perempuan yang belum/tidak

pernah sekolah menempati urutan kedua yang mendominasi petani usaha tanaman perkebunan sebesar 27,26 persen.

Dalam melakukan pengelolaan usaha tanaman perkebunan, yang diawali dari penentuan jenis tanaman perkebunan yang ditanam, jenis dan banyak pupuk yang dipakai, jenis dan banyak pestisida yang dipakai, banyaknya uang untuk pembelian saprotan dan banyaknya produksi yang dijual, keputusan yang ditentukan oleh laki-laki dan secara bersama-sama (laki-laki dan perempuan) memiliki peranan yang sama.

Tabel 4.11. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Kegiatan dan Pengambil Keputusan dalam Rumah tangga

Jenis Kegiatan	Pengambil Keputusan		
	Laki-laki	Perempuan	Bersama-sama
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Tanaman Perkebunan yang Ditanam	42,62	12,49	44,89
Jenis dan banyak Pupuk yang Dipakai	43,18	13,33	43,49
Jenis dan banyak pestisida yang dipakai	43,32	12,12	44,55
Banyaknya uang untuk pembelian saprotan	36,37	15,38	48,24
Banyaknya produksi yang dijual	34,73	20,28	44,99
Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga	10,28	54,66	35,06

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Walaupun masih dengan persentase yang kecil, tetapi peran perempuan mulai meningkat ketika menentukan keputusan tentang banyaknya uang untuk pembelian saprotan dan banyaknya produksi yang dijual. Dan mencapai puncaknya dalam keputusan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga yang mencapai 54,66 persen.

4.3.2. Akses Pekebun ke Sumber Daya Produktif

Keinginan rumah tangga usaha tanaman perkebunan untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha tanaman perkebunan yang dimilikinya tidak terlepas dari akses yang dimiliki rumah tangga usaha tanaman perkebunan tersebut ke sumber daya produktif. Hasil ST03 mencatat ada 3 (tiga) akses yang dapat dijadikan rumah tangga usaha tanaman perkebunan sebagai jalan menuju pengembangan usaha tanaman perkebunan yang meliputi menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD)/Koperasi tani, menghadiri penyuluhan usaha perkebunan maupun menjadi anggota kelompok tani.

Terhadap ketiga akses yang ada tersebut, hanya sebagian kecil rumah tangga usaha perkebunan yang ikut terlibat didalamnya. Pada jenis keanggotaan KUD/koperasi tani, rumah tangga usaha tanaman perkebunan yang terdaftar sebagai anggota hanya mencapai 2,82 persen, yang mengikuti penyuluhan usaha perkebunan sebesar 2,04 persen dan kelompok tani sebesar 2,79 persen.

Tabel 4.12. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Perkebunan Keikutsertaan Menurut Jenis Keanggotaan

Jenis Keanggotaan (1)	Keikutsertaan	
	Ya (2)	Tidak (3)
KUD/Koperasi tani	2,82	97,18
Penyuluhan Usaha Perkebunan	2,04	97,96
Kelompok Tani	2,79	97,21

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan rumah tangga usaha tanaman perkebunan yang memberikan jawaban tidak pada ketiga akses yang ditanyakan pada ST03 masih bernilai cukup tinggi.

Bila ditanyakan alasan tidak menjadi anggota KUD, 66,68 persen rumah tangga berpendapat pada belum ada koperasi di tempat tinggalnya, disusul oleh mereka yang tinggal di daerah yang KUD sudah ada tetapi belum berminat yang mencapai 14,89

persen serta rumah tangga yang tidak berminat sebesar 8,24 persen. Sedangkan yang menyatakan alasan lainnya mencapai 10,18 persen.

Tabel 4.13. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Perkebunan menurut Alasan Utama Tidak menjadi Anggota KUD

Uraian (1)	Persentase (2)
Belum ada KUD	66,68
Sudah ada KUD tetapi belum berminat	14,89
Tidak berminat	8,24
Lainnya	10,18
Jumlah	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Terhadap keengganan menjadi anggota kelompok tani, sebanyak 78,64 persen rumah tangga menyatakan dikarenakan belum ada kelompok tani di tempat tinggalnya, disusul oleh mereka yang belum/tidak berminat yang mencapai 10,05 persen. Sedangkan yang menyatakan tidak berminat karena tidak berguna dan lainnya masing-masing mencapai 4,14 persen dan 7,17 persen.

Tabel 4.14. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Perkebunan menurut Alasan Utama Tidak menjadi Anggota Kelompok Tani

Uraian (1)	Persentase (2)
Belum ada kelompok tani	78,64
Belum/tidak berminat	10,05
Tidak berminat karena tidak berguna	4,14
Lainnya	7,17
Jumlah	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Terhadap pelayanan yang pernah diterima dari KUD, rumah tangga usaha tanaman perkebunan yang menjadi anggota KUD mendapatkan pelayanan kredit uang sebanyak 77,98 persen, pengadaan sarana produksi sebanyak 83,56 persen, pengolahan hasil sebesar 40,65 persen, penjualan hasil sebanyak 68,03 persen, pelayanan transportasi sebesar 100,00 persen, pelayanan lainnya sebesar 44,69 persen dan rumah tangga usaha tanaman perkebunan yang mendapatkan lebih dari satu pelayanan sebesar 81,29 persen.

Tabel 4.15. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Perkebunan menurut Jenis Pelayanan Yang Pernah Diterima dari KUD dan Keanggotaan KUD

Jenis Pelayanan Yang Pernah Diterima dari KUD	Anggota KUD	Bukan Anggota KUD
(1)	(2)	(3)
Kredit Uang	77,98	22,02
Pengadaan Sarana Produksi	83,56	16,44
Pengolahan Hasil	40,65	59,35
Penjualan Hasil	68,03	31,97
Pelayanan Transportasi	100,00	0,00
Lainnya	44,69	55,31
Lebih dari satu pelayanan	81,29	18,71

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

BAB V

ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA HORTIKULTURA

Sub sektor hortikultura merupakan salah satu sub dari sektor pertanian yang memegang peranan yang cukup penting dalam sektor pertanian. Sub sektor hortikultura meliputi kegiatan di bidang pembudidayaan tanaman hortikultura baik sayuran dan buah-buahan semusim, buah-buahan dan sayuran tahunan, tanaman biofarmaka (obat-obatan), dan tanaman hias.

5.1. Profil Rumah Tangga Usaha Hortikultura

5.1.1. Distribusi Rumah Tangga Usaha Hortikultura

Dari 338.617 rumah tangga usaha tanaman hortikultura di Sumatera Utara, hasil ST03, sebanyak 28,05 persen rumah tangga usaha tanaman hortikultura memilih tanaman pisang sebagai tanaman hortikultura yang diusahakan, disusul oleh rumah tangga tanaman cabe merah sebesar 11,40 persen, tanaman rambutan sebesar 11,13 persen dan tanaman durian sebesar 10,10 persen.

Besarnya minat rumah tangga memilih tanaman hortikultura tersebut di atas sebagai tanaman hortikultura utama yang diusahakan didorong oleh besarnya permintaan pasar sebagai akibat dari besarnya kebutuhan masyarakat akan hasil produksi tanaman hortikultura tersebut, khususnya masakan masyarakat Sumatera Utara yang dikenal dekat dengan pemakaian cabe merah.

Sedangkan rumah tangga usaha tanaman hortikultura yang memilih jengkol sebagai tanaman hortikultura yang diusahakan hanya sebesar 0,28 persen, disusul oleh rumah tangga usaha hortikultura yang memilih tanaman cabe hijau sebesar 0,34 persen, tanaman petai mencapai 0,40 persen, tanaman bawang daun mencapai 0,41 persen, dan tanaman wortel sebesar 0,44 persen.

Tabel 5.1. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Tanaman Yang Diusahakan Setahun Yang Lalu

No.	Nama Tanaman	Persentase
(1)	(2)	(3)
1.	Bawang Daun	0,41
2.	Bawang Merah	2,19
3.	Bayam	0,68
4.	Buncis	0,87
5.	Cabe Hijau	0,34
6.	Cabe Merah	11,40
7.	Cabe Rawit	1,36
8.	Durian	10,10
9.	Gabungan	5,03
10.	Jahe	0,82
11.	Jengkol	0,28
12.	Jeruk	9,40
13.	Kacang Panjang	1,60
14.	Kencur	0,47
15.	Kentang	2,18
16.	Kubis	2,33
17.	Mangga	3,15
18.	Manggis	1,71
19.	Nenas	0,72
20.	Petai	0,40
21.	Petsai/Sawi	0,73
22.	Pisang	28,05
23.	Rambutan	11,13
24.	Salak	2,84
25.	Tomat	1,38
26.	Wortel	0,44
Jumlah		100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

5.1.2. Karakteristik Petani Hortikultura

Petani hortikultura meliputi dua kelompok yaitu mereka yang termasuk sebagai petani dan buruh. Petani adalah mereka yang berusaha/memiliki usaha tanaman

hortikultura dan buruh adalah mereka yang bekerja pada suatu usaha di sektor pertanian atas balas jasa.

Tabel 5.2. Persentase Petani Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan

Kelompok Umur (Tahun)	Status Pekerjaan		
	Petani	Buruh	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
10 – 14	1,32	3,62	1,43
15 – 19	1,58	10,72	2,02
20 – 24	2,66	16,83	3,34
25 – 29	5,91	8,81	6,04
30 – 34	9,14	11,19	9,24
35 – 39	13,00	8,84	12,80
40 – 44	13,37	12,53	13,33
45 – 49	14,12	8,16	13,83
50 – 54	12,56	10,72	12,48
55 – 59	7,97	3,01	7,73
60 – 64	8,00	3,26	7,77
65 +	10,38	2,31	9,99
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Petani tanaman hortikultura umumnya adalah mereka yang berada pada kelompok umur 45 – 49 tahun yang mencapai 14,12 persen, disusul oleh mereka yang berada pada kelompok umur 40 – 44 tahun sebesar 13,37 persen, kelompok umur 35 – 39 tahun sebesar 13,00 persen dan kelompok umur 50 – 54 tahun sebesar 12,56 persen.

Buruh tanaman hortikultura umumnya berada pada kelompok umur 20 – 24 tahun sebesar 16,83 persen, kelompok umur 40 – 44 tahun sebesar 12,53 persen dan kelompok umur 30 – 34 tahun sebesar 11,19 persen. Mereka yang berada pada kelompok umur 20 – 24 tahun adalah kelompok umur muda dan produktif tetapi memilih tanaman hortikultura sebagai sumber mata pencaharian dan kemungkinan

terkait dengan ketidaktersediaan lapangan kerja yang mampu menampung mereka atau ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ataupun ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 5.3. Persentase Petani Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Pendidikan dan Status Pekerjaan

Pendidikan	Status Pekerjaan		
	Petani	Buruh	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum/tidak punya	16,96	14,87	16,86
SD/setara	35,72	30,75	35,48
SLTP/setara	25,25	30,38	25,49
SMU/setara	20,24	23,53	20,40
D1/D2	0,59	0,43	0,58
Akademi/D3	0,41	0,04	0,40
Universitas/D4	0,83	0,00	0,79
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Secara umum, petani usaha tanaman hortikultura memiliki kesamaan tingkat pendidikan yang ditamatkan walaupun dengan persentase yang berbeda. Petani dan buruh umumnya memiliki tingkat pendidikan SLTA/setara ke bawah.

Petani didominasi oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang ditamatkan SD/setara yang mencapai 35,72 persen, disusul oleh petani dengan tingkat pendidikan SLTP/setara sebesar 25,25 persen dan mereka yang menamatkan pendidikan SMU/setara sebesar 20,24 persen.

Demikian juga halnya dengan kelompok buruh. Buruh tanaman hortikultura dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan SD/setara mencapai 30,75 persen, tingkat pendidikan SMP/setara sebesar 30,38 persen dan pendidikan SMU/setara sebesar 23,53 persen.

5.1.3. Penguasaan dan Penggunaan Lahan

Umumnya, rumah tangga petani usaha tanaman hortikultura di Sumatera Utara adalah masih tergolong sebagai rumah tangga petani gurem. Hal ini ditunjukkan oleh 32,50 persen rumah tangga petani masih menguasai lahan dengan luas yang hanya mencapai < 0,50 Ha, disusul oleh mereka yang menguasai lahan seluas 0,50 – 0,99 Ha yang mencapai 31,02 persen, dan lahan dengan luas 1,00 – 1,99 Ha mencapai 24,96 persen. Sedangkan rumah tangga petani usaha tanaman hortikultura yang menguasai lahan $\geq 3,00$ Ha hanya sebesar 4,32 persen.

Tabel 5.4. Persentase Rumah Tangga Usaha Hortikultura Menurut Kelompok Luas Lahan Di Sumatera Utara

Kelompok Luas Lahan (Ha)	Rumah Tangga	
	Yang Menguasai	Yang Mengusahakan
(1)	(2)	(3)
< 0,50	32,50	80,84
0,50 – 0,99	31,02	13,07
1,00 – 1,99	24,96	5,02
2,00 – 2,99	7,21	0,77
$\geq 3,00$	4,32	0,30
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Masih tingginya persentase rumah tangga petani gurem memberikan gambaran bahwa telah terjadi alih fungsi lahan pada rumah tangga usaha tanaman hortikultura yaitu dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dan juga memberikan gambaran bahwa makin kecilnya minat masyarakat untuk menambah luas lahan yang dikuasainya, baik melalui pembelian ataupun sewa/pinjam dari pemilik lahan/rumah tangga lain.

Sekitar 80,84 persen rumah tangga hortikultura mengusahakan lahan dengan luas < 0,50 Ha, disusul oleh mereka yang mengusahakan lahan dengan luas 0,50 – 0,99 Ha yang mencapai 13,07 persen.

5.2. Struktur Ongkos dan Pendapatan Rumah Tangga Usaha Hortikultura

5.2.1. Struktur Ongkos

Hasil ST03, menunjukkan bahwa tanaman tomat merupakan tanaman usaha hortikultura dengan nilai produksi tertinggi yang mencapai Rp.26.390.233, disusul oleh tanaman jeruk sebesar Rp.23.249.496, tanaman cabe merah sebesar Rp.17.564.937, tanaman cabe rawit sebesar Rp.14.335.644, dan tanaman kentang sebesar Rp.13.437.285.

Tanaman petai merupakan tanaman hortikultura dengan nilai produksi terkecil yang hanya mencapai Rp.1.558.602, disusul oleh tanaman jengkol sebesar Rp.2.746.836, tanaman bayam sebesar Rp.3.731.646, tanaman manggis sebesar Rp.4.272.359 dan tanaman pisang sebesar Rp.4.918.223.

Produktivitas tertinggi diberikan oleh tanaman nenas dengan nilai yang mencapai 15.661,547, disusul oleh tanaman jeruk sebesar 14.818,880, tanaman tomat 12.909,862, tanaman kubis sebesar 12.629,840 dan tanaman petsai/sawi sebesar 9.893,534.

Petai merupakan tanaman hortikultura dengan produktivitas terendah yang hanya mencapai 742,472, disusul oleh tanaman cabe merah sebesar 2.488,514 dan tanaman jengkol sebesar 2.577,990.

Perbandingan biaya produksi terhadap produksi, tanaman bawang merah menempati urutan pertama dengan 51,51 persen, disusul oleh tanaman bayam sebesar 42,06 persen, tanaman petsai/sawi sebesar 41,82 persen, tanaman kubis sebesar 37,25 persen dan tanaman kacang panjang sebesar 36,90 persen, sedangkan yang terendah terjadi di tanaman petsai/sawi yaitu sebesar 2,36 persen..

Tabel 5.5. Rata-rata Produksi dan Produktifitas per Ha Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Tanaman Terpilih

No.	Nama Tanaman	Produktivitas	Produksi (Rp)	% Biaya terhadap Produksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bawang Daun	3.726,044	10.694.503	28,50
2.	Bawang Merah	2.950,308	9.435.291	51,51
3.	Bayam	3.167,258	3.731.646	42,06
4.	Buncis	4.972,077	5.093.069	32,83
5.	Cabe Hijau	3.155,011	12.238.823	25,39
6.	Cabe Merah	2.488,514	17.564.937	25,77
7.	Cabe Rawit	2.875,654	14.335.644	26,87
8.	Durian	4.922,300	9.268.707	10,24
9.	Gabungan	6.262,672	6.727.767	29,35
10.	Jahe	5.240,062	13.090.759	18,74
11.	Jengkol	2.577,990	2.746.836	18,28
12.	Jeruk	14.818,880	23.249.496	28,07
13.	Kacang Panjang	6.956,275	8.595.601	36,90
14.	Kencur	8.999,974	9.750.382	9,94
15.	Kentang	8.555,342	13.437.285	34,21
16.	Kubis	12.629,840	6.429.194	37,25
17.	Mangga	4.882,152	7.996.938	14,81
18.	Manggis	3.250,357	4.272.359	7,56
19.	Nenas	15.661,547	11.732.624	5,95
20.	Petai	742,472	1.558.602	2,36
21.	Petsai/Sawi	9.893,534	8.713.259	41,82
22.	Pisang	5.290,276	4.918.223	9,14
23.	Rambutan	5.277,373	7.244.529	6,74
24.	Salak	6.993,037	8.353.087	10,55
25.	Tomat	12.909,862	26.390.233	29,37
26.	Wortel	7.351,603	9.462.327	19,21

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Struktur ongkos produksi usaha hortikultura meliputi ongkos produksi, pupuk, pestisida, sewa lahan, tenaga kerja, pengeluaran lain dan pengeluaran pasca panen.

Tabel 5.6. Persentase Struktur Ongkos Produksi dari Usaha Hortikultura Menurut Jenis Tanaman Terpilih

No.	Nama Tanaman	Struktur Ongkos			
		Ongkos Produksi	Pupuk	Pestisida	Sewa Lahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bawang Daun	1,01	10,59	5,23	1,74
2.	Bawang Merah	16,11	9,45	11,85	1,27
3.	Bayam	2,70	9,40	7,29	2,50
4.	Buncis	4,18	12,13	4,78	0,62
5.	Cabe Hijau	1,84	9,90	2,62	1,67
6.	Cabe Merah	2,03	8,59	6,47	1,21
7.	Cabe Rawit	0,39	6,99	3,65	2,89
8.	Durian	0,00	0,07	0,05	0,00
9.	Gabungan	2,12	0,59	3,91	2,22
10.	Jahe	6,20	4,29	1,10	1,27
11.	Jengkol	0,00	1,26	0,07	0,00
12.	Jeruk	0,50	8,79	9,50	0,07
13.	Kacang Panjang	16,36	7,46	4,90	1,01
14.	Kencur	2,12	0,41	1,09	0,00
15.	Kentang	7,93	11,29	7,97	0,85
16.	Kubis	4,47	16,66	9,00	1,13
17.	Mangga	0,24	0,79	0,21	0,05
18.	Manggis	0,21	0,77	0,01	0,16
19.	Nenas	0,00	3,77	0,75	0,21
20.	Petai	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Petsai/Sawi	1,81	28,61	4,58	0,49
22.	Pisang	0,25	1,81	0,73	0,27
23.	Rambutan	0,09	1,78	0,21	0,00
24.	Salak	0,00	0,18	0,01	0,00
25.	Tomat	3,06	0,91	10,19	0,62
26.	Wortel	1,87	5,70	0,32	1,74
Rata-rata		2,90	6,24	3,71	0,85

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Tanaman kacang panjang menempati urutan pertama sebagai tanaman hortikultura dengan persentase ongkos produksi tertinggi yang mencapai 16,36 persen, disusul oleh tanaman bawang merah sebesar 16,11 persen.

Lanjutan Tabel 5.6.

No.	Nama Tanaman	Struktur Ongkos		
		Tenaga Kerja	Pengeluaran Lain	Pengeluaran Pasca Panen
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
1.	Bawang Daun	4,26	0,39	5,30
2.	Bawang Merah	4,12	5,80	2,99
3.	Bayam	10,99	17,69	2,49
4.	Buncis	3,24	4,98	2,99
5.	Cabe Hijau	7,48	0,94	0,94
6.	Cabe Merah	4,11	2,21	1,26
7.	Cabe Rawit	9,40	1,58	2,25
8.	Durian	2,61	2,79	4,71
9.	Gabungan	2,90	4,88	3,93
10.	Jahe	3,02	0,84	2,10
11.	Jengkol	11,17	1,21	4,59
12.	Jeruk	5,43	2,85	0,98
13.	Kacang Panjang	1,33	1,89	4,07
14.	Kencur	0,22	1,29	4,81
15.	Kentang	3,87	1,20	1,36
16.	Kubis	2,81	1,33	2,45
17.	Mangga	7,15	12,11	1,40
18.	Manggis	4,15	0,69	1,58
19.	Nenas	0,94	0,21	0,16
20.	Petai	1,10	0,22	1,04
21.	Petsai/Sawi	1,83	1,98	2,54
22.	Pisang	1,32	2,35	2,44
23.	Rambutan	1,81	1,82	1,02
24.	Salak	2,10	3,27	4,98
25.	Tomat	2,50	1,98	1,41
26.	Wortel	3,71	0,96	4,92
Rata-rata		3,98	2,98	2,64

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Untuk biaya pupuk, tanaman petsai/sawi menempati urutan pertama dengan 28,61 persen, disusul oleh tanaman kubis sebesar 16,66 persen, tanaman buncis sebesar 12,13 persen, tanaman kentang sebesar 11,29 persen dan tanaman bawang daun sebesar 10,59 persen. Tanaman bawang merah menempati urutan pertama sebagai tanaman

hortikultura dengan persentase biaya pestisida tertinggi yang mencapai 11,85 persen, disusul oleh tanaman tomat sebesar 10,19 persen.

Untuk sewa lahan, tanaman cabe rawit menempati urutan pertama dengan persentase yang mencapai 2,89 persen, disusul oleh tanaman bayam dengan 2,50 persen. Untuk pengeluaran biaya tenaga kerja, tanaman jengkol dan tanaman bayam menjadi tanaman hortikultura dengan persentase tertinggi yang mencapai masing-masing 11,17 persen dan 10,99 persen.

Untuk pengeluaran lain yang meliputi sewa alat, jasa pemeliharaan alat, jasa pertanian lainnya, pajak tak langsung, bunga kredit dan lainnya, tanaman bayam menempati urutan pertama dengan 17,69 persen dan tanaman mangga sebesar 12,11 persen.

Untuk pengeluaran pasca panen (wadah dan pengangkutan), tanaman bawang daun menempati urutan pertama dengan 5,30 persen, disusul oleh tanaman salak dengan 4,98 persen, tanaman kencur dengan 4,81 persen, tanaman durian dengan 4,71 persen dan tanaman jengkol sebesar 4,59 persen.

Secara rata-rata, di Sumatera Utara, rumah tangga usaha hortikultura mengeluarkan biaya untuk pupuk mencapai 6,24 persen, disusul oleh pengeluaran untuk tenaga kerja sebesar 3,98 persen, dan pestisida sebesar 3,71 persen

5.2.2. Struktur Pendapatan

Rumah tangga usaha tanaman hortikultura yang mempunyai sumber pendapatan dari usaha tanaman hortikultura sebanyak 83,76 persen dan 16,24 persen sisanya berasal dari pendapatannya sebagai buruh.

Bila dilihat menurut sumber pendapatan utama rumah tangga usaha tanaman hortikultura, petani umumnya pendapatan utamanya bersumber dari tanaman hortikultura terpilih yang mencapai 98,49 persen, tanaman hortikultura lainnya sebesar 92,80 persen, pertanian lainnya sebesar 92,15 persen dan perdagangan sebesar 97,40 persen.

Tabel 5.7. Persentase Rumah Tangga Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Status Pekerjaan

Sumber Pendapatan Utama	Status Pekerjaan		
	Petani	Buruh	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanaman Hortikultura Terpilih	98,49	1,51	100,00
Tanaman Hortikultura Lainnya	92,80	7,20	100,00
Pertanian Lainnya	92,15	7,85	100,00
Perdagangan	97,40	2,60	100,00
Industri Pengolahan	31,33	68,67	100,00
Sektor Lainnya	34,62	65,38	100,00
Penerima Pendapatan	0,00	100,00	100,00
Jumlah	83,76	16,24	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan pada sumber pendapatan utama berupa penerima pendapatan, semua buruh menyatakan sebagai penerima pendapatan, disusul oleh sumber pendapatan utama dari industri pengolahan sebesar 68,67 persen dan sektor lainnya sebesar 65,38 persen.

Tabel 5.8. Persentase Rumah Tangga Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Kelompok Luas Lahan dan Kategori Pendapatan

Kelompok Luas Lahan (m ²)	Lebih dari Cukup	Cukup	Kurang	Kurang Sekali	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
< 500	1.06	14.97	50.12	33.85	100.00
500 – 999	0.57	20.52	57.95	20.96	100.00
1.000 – 2.999	0.77	23.83	61.67	13.73	100.00
3.000 – 4.999	1.32	37.44	52.95	8.29	100.00
5.000 – 9.999	1.78	40.64	48.68	8.90	100.00
≥ 10.000	2.65	45.79	42.94	8.62	100.00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Bila ditanyakan pendapatnya tentang pendapatan dari usaha tanaman hortikultura, sebagian besar rumah tangga usaha tanaman hortikultura menyatakan pendapatan dari usaha tanaman hortikultura kurang pada seluruh kelompok luas lahan. Sekitar 61,67 persen rumah tangga usaha tanaman hortikultura dengan luas lahan 1.000 – 2.999 m² menyatakan kurang, 57,95 persen pada kelompok luas lahan 500 – 999 m², 52,95 persen pada kelompok luas lahan 3.000 – 4.999 m² dan 50,12 persen pada kelompok luas lahan < 500 m².

5.3. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Hortikultura

5.3.1. Ketenagakerjaan dan Gender

Sebagaimana pada dua usaha tanaman pertanian yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu usaha tanaman palawija dan usaha tanaman perkebunan, pada rumah tangga usaha tanaman hortikultura juga dilakukan analisis ketenagakerjaan yang berdasarkan gender atau perbedaan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan untuk melihat peranan yang diberikan oleh pekerja laki-laki dan perempuan terhadap usaha tanaman hortikultura.

Dari 407.771 petani usaha tanaman hortikultura, hanya 21,55 persen perempuan yang terlibat didalamnya (87.878 orang). Tetapi pada status pekerjaan sebagai buruh usaha tanaman hortikultura, perempuan mendominasi dengan persentase yang mencapai 75,97 persen (15.516 buruh dari 20.424 buruh).

Masih tingginya persentase laki-laki yang berprofesi sebagai petani usaha tanaman hortikultura menunjukkan masih dominannya budaya atau tradisi dimana laki-laki sebagai penerus dari usaha tanaman hortikultura.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, tenaga kerja yang terlibat didalam usaha tanaman hortikultura memberikan peranan yang sama. Pada kelompok petani, 14,55 persen laki-laki yang berusia 45 – 49 tahun menempati urutan pertama, disusul oleh

mereka yang berada pada kelompok umur 35 – 39 tahun sebesar 14,26 persen, dan 40 – 44 tahun sebesar 13,99 persen.

Sedangkan pada petani perempuan, 12,56 persen perempuan yang berusia 45 – 49 tahun menempati urutan pertama, disusul oleh kelompok umur 50 – 54 tahun sebesar 12,54 persen dan mereka yang berusia 65 tahun ke atas sebesar 11,90 persen.

Tabel 5.9. Persentase Petani Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (Tahun)	Petani Tanaman Hortikultura		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
10 – 14	0,84	3,06	1,32
15 – 19	1,32	2,53	1,58
20 – 24	2,33	3,88	2,66
25 – 29	5,79	6,34	5,91
30 – 34	9,80	6,74	9,14
35 – 39	14,26	8,43	13,00
40 – 44	13,99	11,11	13,37
45 – 49	14,55	12,56	14,12
50 – 54	12,57	12,54	12,56
55 – 59	7,56	9,43	7,97
60 – 64	7,04	11,47	8,00
65 +	9,96	11,90	10,38
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada rumah tangga usaha tanaman hortikultura yang berstatus sebagai buruh, 44,64 persen buruh laki-laki yang berusia 20 – 24 tahun menempati urutan pertama, disusul oleh mereka yang berada pada kelompok umur 15 – 19 tahun sebesar 20,66 persen, dan kelompok umur 25 – 29 tahun sebesar 10,84 persen. Sedangkan pada buruh perempuan, 15,85 persen perempuan yang berusia 40 – 44 tahun menempati urutan pertama, disusul oleh kelompok umur 50 – 54 tahun sebesar 13,66 persen dan mereka yang berusia 30 – 34 tahun ke atas sebesar 13,06 persen.

Tabel 5.10. Persentase Buruh Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (Tahun)	Buruh Tanaman Hortikultura		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
10 – 14	6,78	2,62	3,62
15 – 19	20,66	7,57	10,72
20 – 24	44,64	8,04	16,83
25 – 29	10,84	8,17	8,81
30 – 34	5,26	13,06	11,19
35 – 39	4,93	10,07	8,84
40 – 44	2,04	15,85	12,53
45 – 49	0,47	10,59	8,16
50 – 54	1,45	13,66	10,72
55 – 59	0	3,96	3,01
60 – 64	1,39	3,85	3,26
65 +	1,55	2,55	2,31
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Bila dilihat menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, petani usaha tanaman hortikultura baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat pendidikan yang sama. Pada kelompok petani laki-laki, petani dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD/setara menempati urutan pertama dengan persentase yang mencapai 35,54 persen, disusul oleh petani dengan pendidikan SLTP/setara sebesar 25,66 persen dan tingkat pendidikan SMU sebesar 22,22 persen.

Demikian juga halnya dengan kelompok petani perempuan. Petani dengan tingkat pendidikan SD/setara menempati urutan pertama dengan 36,37 persen. Disusul oleh petani dengan pendidikan SLTP/setara sebesar 25,74 persen dan tingkat pendidikan SMU sebesar 13,01 persen.

Tabel 5.11. Persentase Petani Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Pendidikan dan Status Pekerjaan

Pendidikan	Petani Usaha Tanaman Hortikultura		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum/tidak punya	14,45	26,09	16,96
SD/setara	35,54	36,37	35,72
SLTP/setara	25,66	23,74	25,25
SMU/setara	22,22	13,01	20,24
D1/D2	0,71	0,17	0,59
Akademi/D3	0,42	0,41	0,41
Universitas/D4	1,00	0,21	0,83
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada kelompok buruh, buruh laki-laki dengan tingkat pendidikan SMU/setara menempati urutan pertama dengan 39,28 persen, disusul oleh mereka yang berpendidikan SLTP sebesar 38,06 persen dan pendidikan SD sebesar 15,14 persen. Sedangkan pada buruh perempuan, buruh dengan tingkat pendidikan SD/setara menempati urutan pertama sebesar 35,69 persen, disusul oleh mereka yang berpendidikan SLTP sebesar 27,95 persen dan pendidikan SMU sebesar 18,54 persen.

Terjunnya perempuan sebagai buruh tanaman hortikultura dengan hanya bekal pendidikan setingkat SD/setara menunjukkan masih adanya perlakuan diskriminatif yang diberikan kepada perempuan dan yang hingga saat ini masih berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kesulitan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang menghinggapi rumah tangga petani tanaman hortikultura merupakan salah satu faktor pendorong dari diabaikannya pendidikan terhadap perempuan. Disamping juga ketidakpedulian orang tua untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada perempuan merupakan faktor yang mendorong perempuan untuk terjun menjadi buruh usaha tanaman hortikultura. Ketika perempuan memasuki kehidupan rumah tangga, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tujuan membantu suami/kepala rumah tangga, pekerjaan sebagai buruh tanaman hortikultura tersebut menjadikan sebagai pilihan yang harus dipilih.

Tabel 5.12. Persentase Buruh Tanaman Hortikultura Menurut Pendidikan dan Status Pekerjaan

Pendidikan	Buruh Tanaman Hortikultura		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum/tidak punya	7,11	17,33	14,87
SD/setara	15,14	35,69	30,75
SLTP/setara	38,06	27,95	30,38
SMU/setara	39,28	18,54	23,53
D1/D2	0,22	0,49	0,43
Akademi/D3	0,18	0,00	0,04
Universitas/D4	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Dalam melakukan pengelolaan usaha tanaman hortikultura, yang diawali dari penentuan jenis tanaman hortikultura yang ditanam, jenis dan banyak pupuk yang dipakai, jenis dan banyak pestisida yang dipakai, banyaknya uang untuk pembelian saprotan (sarana produksi pertanian) dan banyaknya produksi yang dijual, keputusan yang ditentukan secara bersama-sama (laki-laki dan perempuan) memiliki peranan yang berbeda.

Menyangkut keputusan mengenai jenis tanaman hortikultura yang ditanam, 41,01 persen keputusan ditentukan oleh laki-laki dan 48,77 ditentukan secara bersama-sama. Keputusan mengenai jenis dan banyak pupuk yang dipakai, 41,68 persen ditentukan oleh laki-laki dan 47,98 persen ditentukan secara bersama-sama. Demikian juga halnya dengan penentuan jenis dan banyak pestisida yang dipakai, 44,46 persen ditentukan oleh laki-laki dan 44,83 persen ditentukan secara bersama-sama. Masih besarnya peranan laki-laki didalam mengambil keputusan menunjukkan masih kuatnya tradisi yang memberikan perlakuan khusus kepada laki-laki untuk berperan di dalam usaha tanaman hortikultura.

Tabel 5.13. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Kegiatan dan Pengambil Keputusan dalam Rumah tangga

Jenis Kegiatan	Pengambil Keputusan		
	Laki-laki	Perempuan	Bersama-sama
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Tanaman Hortikultura yang Ditanam	41,01	10,22	48,77
Jenis dan banyak Pupuk yang Dipakai	41,68	10,34	47,98
Jenis dan banyak pestisida yang dipakai	44,46	10,71	44,83
Banyaknya uang untuk pembelian saprotan	37,49	14,80	47,70
Banyaknya produksi yang dijual	24,94	18,87	56,19
Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga	7,65	54,59	37,76

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Walaupun masih dengan persentase yang kecil, tetapi peran perempuan mulai meningkat ketika menentukan keputusan tentang banyaknya uang untuk pembelian saprotan dan banyaknya produksi yang dijual. Dan mencapai puncaknya dalam keputusan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga yang mencapai 54,59 persen.

5.3.2. Akses Petani Hortikultura ke Sumber Daya Produktif

Keberlanjutan dan peningkatan atau pengembangan usaha tanaman hortikultura tidak terlepas dari akses yang dimiliki petani ke sumber daya produktif. Dengan dukungan teknologi informasi, seharusnya berbagai pengetahuan tentang pengelolaan dan peningkatan usaha tanaman hortikultura dapat tersebar luas dan diserap dengan cepat oleh rumah tangga usaha tanaman tersebut. Dan salah satu akses yang ada di lingkungan usaha tanaman hortikultura adalah menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD)/Koperasi tani, menghadiri penyuluhan usaha hortikultura maupun menjadi anggota kelompok tani.

Terhadap ketiga akses yang ada tersebut, hanya sebagian kecil rumah tangga usaha hortikultura yang ikut terlibat didalamnya. Pada jenis keanggotaan KUD/koperasi tani, rumah tangga yang terdaftar sebagai anggota hanya mencapai 1,74 persen (5.822 rumah tangga), mengikuti penyuluhan usaha hortikultura sebesar 3,21 persen (10.755 rumah tangga) dan kelompok tani sebesar 1,58 persen (5.285 rumah tangga).

Tabel 5.14. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Hortikultura Menurut Jenis Keanggotaan

Jenis Keanggotaan	Keikutsertaan	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
KUD/Koperasi tani	1,74	98,26
Penyuluhan Usaha Hortikultura	3,21	96,79
Kelompok Tani	1,58	98,42

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Besarnya persentase rumah tangga yang memberi jawaban tidak pada ketiga jenis keanggotaan di atas, mencerminkan masih kurang sosialisasi mengenai manfaat yang diperoleh dengan mengikuti kegiatan tersebut dalam mengembangkan usaha hortikultura yang dimilikinya.

Bila ditanyakan alasan tidak menjadi anggota KUD, 73,41 persen rumah tangga berpendapat bahwa keengganan menjadi anggota KUD disebabkan karena belum ada koperasi, disusul oleh mereka yang belum/tidak berminat sebesar 16,35 persen dan dikarenakan alasan lainnya sebesar 5,43 persen. Sedangkan yang menyatakan pelayanan yang didapat dari KUD tidak memuaskan sebesar 3,47 persen dan dikarenakan proses administrasi yang sulit hanya 1,34 persen. Masih adanya rumah tangga usaha tanaman hortikultura yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan KUD belum memuaskan merupakan tantangan bagi perbaikan kinerja KUD.

Tabel 5.15. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Hortikultura menurut Alasan Utama Tidak menjadi Anggota KUD

Uraian (1)	Persentase (2)
Belum ada koperasi	73,41
Belum/tidak berminat	16,35
Pelayanan tidak memuaskan	3,47
Proses administrasi sulit	1,34
Lainnya	5,43
Jumlah	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Terhadap keengganan rumah tangga usaha tanaman hortikultura menjadi anggota kelompok tani, 83,92 persen rumah tangga menyatakan dikarenakan belum ada kelompok tani, disusul oleh mereka yang menyatakan belum/tidak berminat sebesar 7,14 persen. Sedangkan yang menyatakan tidak berminat karena tidak berguna dan dikarenakan alasan lainnya masing-masing mencapai 4,04 persen dan 4,89 persen.

Tabel 5.16. Persentase Rumah tangga Usaha Tanaman Hortikultura menurut Alasan Utama Tidak menjadi Anggota Kelompok Tani

Uraian (1)	Persentase (2)
Belum ada kelompok tani	83,92
Belum/tidak berminat	7,14
Tidak berminat karena tidak berguna	4,04
Lainnya	4,89
Jumlah	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

BAB VI

ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN

Usaha peternakan rakyat pada umumnya masih merupakan kegiatan sambilan atau hanya sebagai pelengkap menambah pendapatan rumah tangga bagi rumah tangga pertanian. Hal ini dilakukan untuk mengisi waktu luang diantara kegiatan pokok pada rumah tangga pertanian, seperti mengisi waktu untuk menunggu panen, sehingga pengelolaannya cenderung bersifat seadanya/tradisional. Oleh karena itu, tidak banyak peternak yang menggantungkan hidupnya hanya dari hasil peternakan. Meskipun demikian, ada sejumlah peternak (seperti peternak babi di daerah Tapanuli) yang menjadikan usahanya sebagai mata pencaharian atau sumber utama pendapatan dalam menopang perekonomian keluarga.

6.1. Profil Rumahtanga Usaha Peternakan

6.1.1. Distribusi Rumah tangga Usaha Peternakan

Berdasarkan hasil pencacahan ST03 subsektor peternakan, tercatat bahwa jumlah rumah tangga usaha peternakan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 20,72 persen (261.626 rumah tangga) dari 1.262.421 rumah tangga pertanian di Sumatera Utara.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar rumah tangga usaha peternakan di Sumatera Utara mengusahakan jenis ternak babi, dimana jumlahnya mencapai 27,89 persen. Rumah tangga usaha peternakan yang juga banyak terdapat di Sumatera Utara adalah rumah tangga usaha ternak ayam buras sebesar 25,19 persen.

Sementara itu, rumah tangga usaha peternakan yang mengusahakan jenis ternak kerbau sebanyak 7,74 persen; sapi sebanyak 15,48 persen; kambing sebanyak 11,07 persen; dan domba sebanyak 0,67 persen, sedangkan rumah tangga yang mengusahakan unggas seperti ayam ras pedaging dan itik masing-masing hanya sebanyak 0,85 persen dan 9,39 persen.

Tabel 6.1. Jumlah Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Ternak/Unggas yang Diusahakan

No.	Jenis Ternak/Unggas	Persentase
(1)	(2)	(3)
1.	Kerbau	7,74
2.	Sapi	15,48
3.	Babi	27,89
4.	Domba	0,67
5.	Kambing	11,07
6.	Ayam Buras	25,19
7.	Ayam Ras Pedaging	0,85
8.	Itik	9,39
9.	Lainnya	1,72
Jumlah		100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

6.1.2. Karakteristik Peternak

Berbeda dengan rumah tangga usaha peternakan, jumlah peternak di Sumatera Utara ada sebanyak 292.834 orang, yang berarti bahwa dalam satu rumah tangga usaha peternakan ada lebih dari satu orang peternak/pengusaha ternak atau sekitar 1,12 orang per rumah tangga.

Peternak di Sumatera Utara didominasi oleh laki-laki dimana jumlahnya mencapai 229.517 orang (78,38 persen) sedangkan peternak perempuan hanya 63.317 orang (21,62 persen).

Peternak (pengusaha ternak) laki-laki umumnya mengusahakan ternak jenis ayam buras, babi, dan sapi. Peternak ayam buras ada sebanyak 24,87 persen, peternak babi sebanyak 24,22 persen, dan peternak sapi sebanyak 17,49 persen.

Sementara itu, peternak perempuan umumnya mengusahakan ternak jenis ternak babi dan ayam buras. Jumlah peternak babi sebanyak 38,38 persen dan peternak ayam buras sebanyak 28,60 persen.

Tabel 6.2. Jumlah Peternak di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Ternak/Unggas yang Diusahakan dan Jenis Kelamin

No.	Jenis Ternak/Unggas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kerbau	8,22	6,58	7,86
2.	Sapi	17,49	7,39	15,31
3.	Babi	24,22	38,38	27,28
4.	Domba	0,80	0,10	0,65
5.	Kambing	12,25	6,41	10,99
6.	Ayam Buras	24,87	28,60	25,67
7.	Ayam Ras Pedaging	0,95	0,44	0,84
8.	Itik	9,49	10,80	9,78
9.	Lainnya	1,71	1,29	1,62
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, peternak di Sumatera Utara umumnya berumur antara 40 – 59 tahun dengan jumlah mencapai 52,02 persen, sedangkan yang paling sedikit berada pada kelompok umur kurang dari 20 tahun yang hanya mencapai 1,68 persen. Sementara sisanya berada pada kelompok umur 20 – 39 tahun sebanyak 30,35 persen dan kelompok umur lebih dari 59 tahun yaitu sebanyak 15,94 persen.

Bila dilihat peranan yang diberikan antara laki-laki dan perempuan, kondisi sebaran umur peternak tersebut tidak berbeda antara peternak laki-laki dan perempuan. Jumlah peternak laki-laki yang berumur antara 40 – 59 tahun sebanyak 52,41 persen, sedangkan peternak perempuan yang berumur antara 40 – 59 tahun sebanyak 50,61 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan sebagai peternak memang masih dijadikan sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan yang sifatnya untuk mengisi waktu, selain untuk menambah penghasilan ekonomi rumah tangga.

**Tabel 6.3. Jumlah Peternak di Provinsi Sumatera Utara
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
< 20	1,72	1,57	1,68
20 – 24	2,03	2,85	2,21
25 – 29	5,55	4,79	5,38
30 – 34	9,68	7,46	9,20
35 – 39	13,62	13,39	13,57
40 – 44	15,58	12,80	14,98
45 – 49	14,94	13,77	14,69
50 – 54	13,51	15,98	14,05
55 – 59	8,38	8,07	8,31
60 +	15,01	19,33	15,94
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Jika dilihat menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh peternak, setengah dari peternak di Sumatera Utara masih tamatan SD atau bahkan tidak tamat SD. Jumlah peternak yang pendidikannya hanya tamat SD sebanyak 34,38 persen, sedangkan jumlah peternak yang tidak tamat SD sebanyak 15,87 persen. Sementara itu, peternak yang pendidikannya SLTP mencapai 26,41 orang, yang berpendidikan SLTA sebanyak 21,55 persen, dan yang berpendidikan D1/D2 hingga Akademi/Universitas sebanyak 1,79 persen.

Peternak laki-laki didominasi oleh peternak dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah pendidikan SD/setara sebesar 33,98 persen, disusul oleh peternak dengan pendidikan yang ditamatkan SLTP/setara sebesar 26,99 persen dan pendidikan SLTA/setara sebesar 23,22 persen. Sedangkan peternak yang berpendidikan D1/D2 hingga Akademi/Universitas hanya mencapai 1,86 persen.

Tabel 6.4. Jumlah Peternak di Provinsi Sumatera Utara Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum/Tidak Tamat SD	13,96	22,81	15,87
SD/Setara	33,98	35,87	34,38
SLTP/Setara	26,99	24,28	26,41
SLTA/Setara	23,22	15,48	21,55
D1/D2	0,72	0,84	0,74
Akademi/D3	0,56	0,29	0,50
Universitas/D4	0,58	0,44	0,55
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Peternak perempuan didominasi oleh peternak dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah pendidikan SD/setara sebesar 35,87 persen, disusul oleh peternak dengan pendidikan yang ditamatkan SLTP/setara sebesar 24,28 persen dan peternak yang belum/tidak tamat SD sebesar 22,81 persen. Sedangkan peternak yang berpendidikan D1/D2 hingga Akademi/Universitas hanya mencapai 1,57 persen.

6.2. Struktur Ongkos dan Pendapatan Rumah tangga Usaha Peternakan

6.2.1. Struktur Ongkos

Berdasarkan hasil pencacahan ST2003 subsektor Peternakan, nilai produksi rumah tangga usaha peternakan di Sumatera Utara mencapai Rp.725,02 milyar, atau sebesar Rp.2,77 juta per rumah tangga usaha peternakan. Nilai produksi tersebut sebagian besar diperoleh dari hasil primer yang mencapai Rp.541,27 milyar (74,66 persen), sedangkan sisanya berasal dari hasil ikutan, seperti: susu, telur, dan hasil lainnya yang nilainya mencapai Rp.183,75 milyar (25,34 persen).

Tabel 6.5. Nilai Produksi Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Ternak/Unggas dan Jenis Produksinya (000 Rp.)

No.	Jenis Ternak/Unggas	Jenis Produksi		Jumlah	Rata-rata per Rumah tangga
		Primer	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kerbau	87.862.662	2.168.769	90.031.431	4.448
2.	Sapi	174.076.593	2.631.992	176.708.585	4.362
3.	Babi	149.680.095	2.136.521	151.816.616	2.081
4.	Domba	2.957.744	274.570	3.232.314	1.832
5.	Kambing	35.383.560	578.886	35.962.446	1.241
6.	Ayam Buras	36.242.484	88.689.779	124.932.263	1.895
7.	Ayam Ras Pedaging	46.185.444	2.328.360	48.513.804	21.833
8.	Itik	7.116.044	25.226.475	32.342.519	1.317
9.	Lainnya	1.766.606	59.710.505	61.477.111	13.692
Jumlah		541.271.232	183.745.857	725.017.089	2.771

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Produksi terbesar diperoleh rumah tangga usaha peternakan sapi dengan nilai mencapai Rp.176,71 milyar, diikuti oleh rumah tangga usaha peternakan babi sebesar Rp.151,82 milyar dan rumah tangga usaha peternakan ayam buras Rp.124,93 milyar. Akan tetapi jika dilihat rata-rata nilai produksi per rumah tangga usaha peternakan, nilai produksi yang terbesar diperoleh rumah tangga usaha peternakan ayam ras pedaging dimana nilai produksinya mencapai Rp.21,83 juta per rumah tangga, sedangkan setiap rumah tangga usaha peternakan sapi rata-rata hanya menghasilkan Rp.4,36 juta. Sementara itu, rumah tangga usaha peternakan babi (sebagai rumah tangga usaha peternakan terbesar di Sumatera Utara) menghasilkan produksi sebesar Rp.2,08 juta per rumah tangga.

Tabel 6.6. Struktur Ongkos Produksi Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Kegiatan Usaha (000 Rp.)

No.	Jenis Kegiatan Usaha	Struktur Ongkos		Jumlah
		Primer	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembibitan	29.586.875	12.145.838	41.732.713
2.	Penggemukan	193.434.108	63.218.197	256.652.305
3.	Pembibitan & Penggemukan	318.250.249	108.381.822	426.632.071
Jumlah		541.271.232	183.745.857	725.017.089

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada sisi lain, jenis kegiatan usaha gabungan (pembibitan dan penggemukan) pada rumah tangga usaha peternakan menghasilkan nilai produksi sebesar Rp.426,63 milyar, atau sekitar 58,84 persen dari nilai produksi rumah tangga usaha peternakan, sedangkan jenis kegiatan usaha hanya pembibitan memperoleh nilai produksi sebesar Rp.41,73 milyar (5,76 persen) dan jenis kegiatan usaha hanya penggemukan menghasilkan Rp.256,65 milyar (35,40 persen).

Membicarakan nilai produksi tentunya tidak terlepas dari struktur biaya (ongkos) produksi, karena adanya nilai produksi dimulai dari ongkos produksi yang dikeluarkan. Pada rumah tangga usaha peternakan, ongkos produksi yang harus dikeluarkan rumah tangga usaha meliputi upah pekerja, pakan, obat-obatan, bahan bakar, listrik dan air serta lainnya. Pada beberapa jenis ternak/unggas, dapat terjadi bahwa biaya akan pakan ternak dapat dikatakan hampir tidak ada. Hal ini disebabkan karena pakan dimaksud dapat diperoleh dari lokasi usaha dengan sedikit mengeluarkan biaya, kecuali pakan tertentu yang harus dibeli karena merupakan hasil produksi dari industri.

Ongkos produksi usaha peternakan yang paling besar terjadi pada jenis usaha ternak/unggas itik, dimana jumlahnya mencapai 71,08 persen dari nilai produksinya.

Jenis usaha ternak lainnya yang juga memiliki ongkos produksi cukup tinggi adalah jenis usaha ternak ayam ras pedaging (70,54 persen), sedangkan ongkos produksi usaha ternak babi, ayam buras, dan domba masing-masing sebesar 31,21 persen; 24,86 persen; dan 15,57 persen. Sementara itu, ongkos produksi yang relatif rendah terjadi pada usaha ternak kambing (9,43 persen), sapi (6,45 persen), dan kerbau (3,18 persen).

Tabel 6.7. Struktur Ongkos terhadap Nilai Produksi Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara menurut Jenis Ternak/Unggas dan Jenis Ongkos Produksi (Persen)

No.	Jenis Ternak/Unggas	Jenis Ongkos Produksi					Jumlah
		Upah Pekerja	Pakan	Obat-obatan	Bahan Bakar, Listrik, & Air	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kerbau	0,72	0,40	0,37	0,51	1,17	3,18
2.	Sapi	2,31	0,92	0,34	1,36	1,53	6,45
3.	Babi	0,25	23,75	1,25	2,83	3,13	31,21
4.	Domba	1,66	1,01	4,57	4,00	4,34	15,57
5.	Kambing	2,55	1,51	0,37	2,09	2,91	9,43
6.	Ayam Buras	0,49	16,46	2,25	1,88	3,78	24,86
7.	Ayam Ras Pedaging	5,06	59,45	0,92	2,82	2,29	70,54
8.	Itik	2,51	64,18	0,25	1,11	3,04	71,08
9.	Lainnya	2,26	39,44	0,91	1,46	1,44	45,52
Jumlah		1,56	18,35	0,97	1,79	2,40	25,08

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Secara umum, struktur ongkos terbesar dikeluarkan untuk kebutuhan pakan ternak dimana persentasenya mencapai 18,35 persen, sedangkan sisanya adalah untuk upah pekerja (1,56 persen), bahan bakar, listrik, dan air (1,79 persen), obat-obatan (0,97 persen) dan kebutuhan lainnya (2,40 persen).

Meskipun demikian, tidak semua ternak memerlukan ongkos pakan yang tinggi, ternak-ternak yang digembalakan (seperti: kerbau, sapi, domba, dan kambing) justru membutuhkan ongkos pakan relatif kecil dibandingkan upah pekerja. Upah pekerja pada usaha ternak yang digembalakan sebagian besar digunakan untuk upah penggembalaan ternak.

Tabel 6.8. Struktur Ongkos terhadap Nilai Produksi Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara menurut Jenis Kegiatan Usaha dan Jenis Ongkos Produksi (Persen)

No.	Jenis Kegiatan Usaha	Jenis Ongkos Produksi					Jumlah
		Upah Pekerja	Pakan	Obat-obatan	Bahan Bakar, Listrik, & Air	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pembibitan	0,25	18,22	0,82	0,33	2,31	21,92
2.	Penggemukan	2,23	26,66	0,56	2,01	2,52	33,99
3.	Pembibitan & Penggemukan	1,29	13,36	1,23	1,81	2,34	20,02
Jumlah		1,56	18,35	0,97	1,79	2,40	25,08

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu, jika dilihat menurut jenis kegiatan usaha, kegiatan usaha yang paling besar ongkos produksinya adalah kegiatan usaha penggemukan dengan ongkos produksi sebesar 33,99 persen dari nilai produksinya, sedangkan untuk kegiatan pembibitan memerlukan ongkos produksi sebesar 21,92 persen dan kegiatan pembibitan dan penggemukan memerlukan ongkos produksi sebesar 20,02 persen.

6.2.2. Struktur Pendapatan

Dengan rata-rata nilai produksi rumah tangga usaha peternakan sekitar Rp.2,77 juta per tahun atau sekitar Rp.2,08 juta setelah dipotong ongkos produksi tersebut

memperkuat indikasi bahwa kegiatan usaha peternakan hanya dijadikan sebagai usaha sampingan bagi rumah tangga, meskipun ada beberapa rumah tangga yang mengandalkan usaha peternakan untuk menopang perekonomian keluarga.

Tabel 6.9. Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Sumber Pendapatan Utama

No.	Sumber Pendapatan Utama	Persentase Rumah tangga Usaha Peternakan
(1)	(2)	(3)
1.	Ternak/Unggas	4,70
2.	Pertanian lainnya	69,72
3.	Sektor lainnya	22,06
4.	Pendapatan lainnya	2,41
5.	Penerimaan lainnya	1,12
Jumlah		100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Ketidakterseriusan pengelolaan usaha peternakan ini dapat terlihat dari persentase rumah tangga usaha peternakan yang menjadikan usaha ternak/unggas sebagai sumber pendapatan utamanya yang hanya mencapai 4,70 persen. Sementara itu, rumah tangga usaha peternakan yang sumber pendapatan utamanya berasal dari usaha pertanian lainnya mencapai 69,72 persen, sedangkan sisanya memiliki sumber pendapatan utama dari usaha sektor lainnya (22,06 persen), pendapatan lainnya (2,41 persen), dan penerimaan lainnya (1,12 persen).

Jika dilihat lebih lanjut, dari rumah tangga usaha peternakan yang sumber pendapatan utamanya berasal dari hasil usaha ternak/unggas yang sumbangannya pada pendapatan rumah tangga peternakan cukup tinggi (75 – 100 persen) hanya ada sekitar 48,34 persen. Sedangkan yang sumbangannya dapat dikategorikan sedang (50 – 74 persen) ada sekitar 45,02 persen dan yang dikategorikan rendah (25 – 49 persen) ada sekitar 6,64 persen.

Tabel 6.10. Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Persentase Sumbangan pada Pendapatan Rumah Tangga Usaha Peternakan

No.	Sumber Pendapatan Utama	Persentase Sumbangan pada Pendapatan Rumah tangga Usaha Peternakan			Jumlah
		25-49 %	50-74 %	75-100 %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ternak/Unggas	6,64	45,02	48,34	100,00
2.	Pertanian lainnya	3,84	32,89	63,27	100,00
3.	Sektor lainnya	5,13	33,82	61,05	100,00
4.	Pendapatan lainnya	10,50	39,94	49,56	100,00
5.	Penerimaan lainnya	2,60	52,19	45,20	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Rumah tangga usaha peternakan dengan sumber pendapatan utama bukan dari usaha ternak/unggas, menyatakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga memberikan kontribusi cukup tinggi (75 – 100 persen) terhadap pendapatan rumah tangga.

6.3. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah tangga Usaha Peternakan

6.3.1. Ketenagakerjaan dan Gender

Pekerja yang terlibat didalam usaha peternakan meliputi pekerja dibayar dan tidak dibayar. Terlibatnya para pekerja yang tergolong kedalam pekerja tidak dibayar menunjukkan indikasi awal bahwa kegiatan usaha peternakan ini pada awalnya merupakan kegiatan rumah tangga/anggota rumah tangga didalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jumlah pekerja usaha peternakan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 397.833 orang. Dari jumlah pekerja tersebut, sebanyak 97,68 persen merupakan pekerja tidak

dibayar. Jumlah pekerja tidak dibayar terbanyak terdapat pada usaha ternak babi dengan jumlah mencapai 99,56 persen, diikuti oleh usaha ternak/unggas ayam buras sebesar 98,48 persen dan usaha ternak sapi sebesar 93,23 persen. Sementara itu, persentase yang cukup kecil terjadi pada usaha ternak/unggas ayam ras pedaging yang hanya mencapai 57,98 persen.

Tabel 6.11. Jumlah Pekerja Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Ternak/Unggas dan Jenis Pekerja

No.	Jenis Ternak /Unggas	Pekerja Dibayar	Pekerja Tidak Dibayar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kerbau	2,38	97,62	100,00
2.	Sapi	6,77	93,23	100,00
3.	Babi	0,44	99,56	100,00
4.	Domba	2,06	97,94	100,00
5.	Kambing	2,58	97,42	100,00
6.	Ayam Buras	1,52	98,48	100,00
7.	Ayam Ras Pedaging	42,02	57,98	100,00
8.	Itik	0,98	99,02	100,00
9.	Lainnya	4,62	95,38	100,00
Jumlah		2,32	97,68	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pada status pekerja dibayar, jumlah pekerja laki-laki mencapai 88,47 persen dan pekerja perempuan hanya mencapai 11,58 persen. Usaha ternak domba, kambing, ayam ras pedaging dan ternak lainnya merupakan usaha peternakan yang tidak memiliki pekerja dibayar perempuan.

Hal di atas menunjukkan bahwa, selain usaha ternak ayam ras pedaging, pengelolaan usaha ternak masih dilakukan secara sederhana dengan hanya memanfaatkan tenaga-tenaga pekerja tidak dibayar, terutama anggota keluarga.

Tabel 6.12. Jumlah Pekerja Dibayar pada Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara menurut Jenis Ternak/Unggas dan Jenis Kelamin (Persen)

No.	Jenis Ternak/Unggas	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kerbau	56,44	43,56	100,00
2.	Sapi	94,00	6,00	100,00
3.	Babi	61,84	38,16	100,00
4.	Domba	100,00	0	100,00
5.	Kambing	100,00	0	100,00
6.	Ayam Buras	78,87	21,13	100,00
7.	Ayam Ras Pedaging	100,00	0	100,00
8.	Itik	78,40	21,60	100,00
9.	Lainnya	100,00	0	100,00
Jumlah		88,42	11,58	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Jumlah pekerja perempuan dibayar pada usaha ternak ayam buras dan itik memiliki persentase yang tidak berbeda yaitu 21,13 persen pada usaha ternak ayam buras dan 21,60 persen pada usaha ternak itik.

Tabel 6.13. Rata-rata Upah per Hari (000 Rp.) Pekerja Usaha Peternakan menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin

Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		L + P
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Mencari Rumput	7	10	8
Menggembalakan Ternak	8	3	8
Pemeliharaan Ternak	9	5	9
Memungut Hasil	12	10	11
Lainnya	20	18	19

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Dari sisi pengupahan, upah yang diterima oleh pekerja laki-laki umumnya lebih tinggi daripada upah pekerja perempuan, kecuali untuk jenis pekerjaan mencari rumput. Rata-rata upah per hari pencari rumput laki-laki sebesar Rp.7 ribu, sedangkan perempuan mendapat Rp.10 ribu. Untuk jenis pekerjaan pemeliharaan ternak, pekerja laki-laki mendapat upah Rp.9 ribu sedangkan perempuan Rp.5 ribu. Bahkan, kesenjangan yang cukup jauh nampak pada jenis kegiatan penggembalaan ternak, dimana laki-laki mendapat upah Rp.8 ribu, sedangkan perempuan hanya dihargai Rp.3 ribu. Sementara itu, untuk kegiatan memungut hasil peternakan upah yang diperoleh pekerja perempuan sebesar Rp.10 ribu, sedangkan pekerja laki-laki memperoleh Rp.12 ribu.

Tabel 6.14. Persentase Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Kegiatan dan Pengambilan Keputusan

No.	Jenis Kegiatan	Pengambilan Keputusan			Jumlah
		KRT/ART Laki-laki	KRT/ART Perempuan	Bersama-sama	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jenis Ternak/Unggas	34,38	16,65	48,98	100,00
2.	Jumlah Ternak/Unggas	32,08	19,05	48,87	100,00
3.	Penjualan Ternak/Unggas	23,59	20,51	55,89	100,00
4.	Jenis Pakan Ternak/Unggas	32,56	21,53	45,91	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Kesenjangan gender tidak hanya terjadi pada segi pengupahan, namun juga pada segi pengambilan keputusan dalam keluarga mengenai pengusahaan peternakan. Meskipun secara umum keputusan diambil secara bersama-sama (melibatkan laki-laki

dan perempuan), namun pengambilan keputusan oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga perempuan. Untuk menentukan jenis ternak/unggas yang diusahakan misalnya, meskipun jumlah rumah tangga usaha peternakan yang pengambilan keputusannya dilakukan secara bersama-sama sebanyak 48,98 persen, namun jumlah rumah tangga usaha peternakan yang pengambilan keputusannya dilakukan oleh KRT/ART laki-laki masih ada sebanyak 34,38 persen, sedangkan yang dilakukan oleh KRT/ART perempuan sebanyak 16,65 persen. Demikian juga halnya dengan penentuan jumlah ternak/unggas dan jenis pakan ternak/unggas

Berbeda dengan penentuan keputusan menjual tenak/unggas, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang hampir sama yaitu 23,59 persen ditentukan oleh laki-laki berbanding 20,51 persen yang ditentukan oleh perempuan..

6.3.2. Akses Peternak ke Sumber Daya Produktif

Salah satu cara peningkatan pengetahuan rumah tangga usaha peternakan untuk dapat mengembangkan usahanya adalah dengan cara ikutserta dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh koperasi atau kelompok tani dan melalui bimbingan-bimbingan penyuluhan.

Dari sebanyak 261.626 rumah tangga usaha peternakan di Sumatera Utara, hanya ada 0,92 persen yang pernah mendapat pelayanan koperasi, sedangkan yang pernah mendapat pelayanan kelompok tani hanya 0,87 persen dan yang pernah mengikuti bimbingan hanya 1,77 persen.

Masih minimnya keikutsertaan ataupun keterlibatan rumah tangga usaha peternakan didalam kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dapat menjadi penghalang bagi rumah tangga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan baru akan pengelolaan usaha peternakan yang berdampak pada terhambatnya kemajuan usaha peternakan yang digeluti rumah tangga.

Tabel 6.15. Jumlah Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara menurut Keikutsertaan dalam Pelayanan dan Bimbingan

No.	Jenis Ternak/Unggas	Mendapat Pelayanan Koperasi	Mendapat Pelayanan Kelompok Tani	Mengikuti Bimbingan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kerbau	0,21	0,04	0,04
2.	Sapi	0,46	1,48	4,38
3.	Babi	1,01	0,85	1,30
4.	Domba	0,00	4,93	4,93
5.	Kambing	0,44	0,67	0,50
6.	Ayam Buras	1,05	0,79	1,24
7.	Ayam Ras Pedaging	6,30	8,60	6,80
8.	Itik	0,07	0,07	0,79
9.	Lainnya	10,40	1,02	11,22
Jumlah		0,92	0,87	1,77

Catatan: % : Persentase terhadap Rumah tangga Usaha Peternakan masing-masing Jenis Ternak/Unggas
 Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Akan tetapi banyaknya rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan atau bimbingan tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga usaha ternak pada masing-masing jenis ternak. Persentase yang cukup besar justru terjadi pada rumah tangga usaha peternakan ayam ras pedaging, dimana yang pernah mendapat pelayanan koperasi sebesar 6,30 persen, yang pernah mendapatkan pelayanan kelompok tani 8,60 persen dan yang pernah mengikuti bimbingan mencapai 6,80 persen.

Berbeda dengan rumah tangga usaha peternakan yang ada di Sumatera Utara, rumah tangga yang memilih domba sebagai ternak yang diusahakan sama sekali tidak pernah mendapat pelayanan koperasi. Rumah tangga usaha peternakan ini hanya mendapatkan pelayanan kelompok tani dan mengikuti bimbingan. Hal ini kemungkinan disebabkan jumlah rumah tangga usaha peternakan yang ada di Sumatera Utara menyebar.

Tabel 6.16. Persentase Jumlah Peternak di Provinsi Sumatera Utara Menurut Keikutsertaan dalam Pelayanan dan Bimbingan

No.	Jenis Ternak/Unggas	Menjadi Anggota Koperasi	Menjadi Anggota Kelompok	Mengikuti Bimbingan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kerbau	0,89	0,04	0,04
2.	Sapi	5,45	0,89	4,69
3.	Babi	2,97	0,43	1,19
4.	Domba	0	4,56	4,56
5.	Kambing	2,80	1,09	0,45
6.	Ayam Buras	3,63	0,92	1,44
7.	Ayam Ras Pedaging	3,41	0	6,12
8.	Itik	1,00	0,06	0,68
9.	Lainnya	13,91	0	11,31
Jumlah		3,30	0,65	1,80

*Catatan: % : Persentase terhadap Peternak masing-masing Jenis Ternak/Unggas
Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara*

Meskipun rumah tangga usaha ternak/unggas ayam ras pedaging sudah cukup mengerti pentingnya pelayanan dan bimbingan dan berusaha untuk serius mengembangkan usahanya, namun berdasarkan kenyataan di atas dapat dikatakan bahwa secara umum rumah tangga usaha peternakan di Sumatera Utara belum serius mengembangkan usahanya, sehingga usaha ternak tetap sebagai usaha sampingan Rumah tangga.

Sama halnya dengan rumah tangga usaha peternakan, hasil pencacahan ST03 menyebutkan bahwa dari 292.834 peternak di Sumatera Utara hanya ada 3,30 persen yang menjadi anggota koperasi, sedangkan yang menjadi anggota kelompok tani hanya 0,65 persen dan yang pernah mengikuti bimbingan hanya 1,80 persen.

Tabel 6.17. Persentase Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Sumber Kredit/Tambahan Modal untuk Usaha selama Setahun yang lalu dan Aksesnya

No.	Sumber Kredit/ Tambahan Modal	Akses ke Sumber Kredit		Jumlah
		Tidak Mengalami Kesulitan	Mengalami Kesulitan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bank	10,71	8,60	8,70
2.	Koperasi	13,10	3,77	4,21
3.	Perorangan	54,76	77,56	76,49
4.	Lainnya	21,43	10,07	10,61
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Selain pelayanan dan bimbingan penyuluhan, permodalan merupakan kebutuhan pokok dalam melakukan usaha peternakan, terutama dalam pengadaan bibit dan pakan. Jumlah rumah tangga usaha peternakan yang memperoleh tambahan modal selama setahun yang lalu ada sebanyak 1.782 rumah tangga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 76,49 persen rumah tangga memperoleh tambahan modal dari perorangan, 8,70 persen dari bank, dan 4,21 persen dari koperasi sedangkan sisanya dari sumber kredit lainnya.

Akan tetapi, dari 1.782 rumah tangga yang mendapat kredit/tambahan modal hanya 84 rumah tangga yang tidak mengalami kesulitan, sedangkan sisanya (95,29 persen) mengalami kesulitan. Masih tingginya persentase rumah tangga usaha peternakan yang mengalami kesulitan akses ke sumber kredit menggambarkan bahwa masih belum meluasnya informasi mengenai prosedur perolehan modal di kalangan peternak.

Kesulitan yang dialami rumah tangga berbeda-beda dalam setiap sumber kredit. Untuk sumber kredit/permodalan dari bank, rumah tangga yang meminjam modal mengalami kesulitan karena harus adanya agunan (ada sebanyak 68,49 persen rumah

tangga yang mengalami kesulitan dalam hal ini) dan bunga yang cukup tinggi (ada sekitar 31,51 persen rumah tangga), sedangkan untuk sumber kredit/permodalan koperasi, umumnya rumah tangga mengalami kesulitan karena adanya syarat agunan.

Tabel 6.18. Persentase Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Sumber Kredit/Tambahan Modal untuk Usaha selama Setahun yang lalu dan Alasan kesulitan dalam Memperoleh Kredit

No.	Sumber Kredit/ Tambahan Modal	Alasan Kesulitan dalam Memperoleh Kredit		
		Bunga Tinggi	Harus Memakai Agunan	Bank/ Koperasi terlalu jauh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bank	31,51	68,49	-
2.	Koperasi	-	100,00	-
3.	Perorangan	7,37	11,54	2,96
4.	Lainnya	51,46	27,49	-
Jumlah		13,60	21,38	2,30

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu, rumah tangga usaha peternakan yang meminjam kredit/modal pada perorangan mengakui bahwa mereka kesulitan karena prosesnya berbelit-belit (32,65 persen), harus ada agunan (11,54 persen), bunga tinggi (7,37 persen), sementara yang menyatakan letak bank/koperasi terlalu jauh hanya sebesar 2,96 persen.

Secara umum, kesulitan yang dihadapi dalam memperoleh kredit bagi rumah tangga usaha peternakan di Sumatera Utara adalah proses yang berbelit-belit (27,44 persen), harus adanya agunan (21,38 persen), bunga tinggi (13,60 persen), dan bank/koperasi terlalu jauh (2,30 persen), sedangkan sisanya karena hal-hal lain yang kemungkinan dari kurangnya pengetahuan rumah tangga ataupun keengganan rumah tangga untuk berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan permodalan.

Lanjutan Tabel 6.18.

No.	Sumber Kredit/ Tambahannya Modal	Alasan Kesulitan dalam Memperoleh Kredit		Jumlah
		Proses Berbelit-belit	Lainnya	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1.	Bank	-	-	100,00
2.	Koperasi	-	-	100,00
3.	Perorangan	32,65	45,48	100,00
4.	Lainnya	21,05	-	100,00
Jumlah		27,44	35,28	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Selain kesulitan dalam memperoleh kredit, sebagian rumah tangga usaha peternakan juga mengalami kesulitan dalam hal pemasaran hasil produksi usaha ternaknya. Penyebab utama kesulitan pemasaran adalah rendahnya harga produksi ternak yang dialami 70,92 persen rumah tangga usaha peternakan yang mengalami kesulitan pemasaran. Selain itu, penyebab lainnya adalah sarana angkutan yang dialami oleh sekitar 14,99 persen rumah tangga usaha peternakan, rendahnya kualitas produksi (1,87 persen), dan melimpahnya produk (1,67 persen).

Keempat faktor tersebut menjadi penyebab kesulitan pemasaran pada rumah tangga usaha ternak babi, ayam buras, dan itik. Untuk rumah tangga usaha ternak kerbau, penyebab kesulitan pemasarannya adalah rendahnya harga jual yang mencapai 81,47 persen rumah tangga usaha peternakan), minimnya sarana angkutan (11,63 persen), dan rendahnya kualitas produksi (1,83 persen).

Sedangkan kesulitan pemasaran pada rumah tangga usaha ternak ayam ras pedaging disebabkan oleh melimpahnya produk dan rendahnya harga jual. Sementara itu, rumah tangga usaha ternak sapi, domba, dan kambing hanya mengalami kesulitan dalam hal sarana angkutan selain tentunya rendahnya harga jual produk.

Tabel 6.19. Persentase Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara yang Mengalami Kesulitan Pemasaran menurut Penyebab Kesulitan Pemasaran

No.	Jenis Ternak /Unggas	Penyebab Kesulitan Pemasaran					Jumlah
		Sarana Angkutan	Kualitas	Produk Melimpah	Harga Rendah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kerbau	11,63	1,83	-	81,47	5,07	100,00
2.	Sapi	4,72	-	-	90,57	4,72	100,00
3.	Babi	16,92	1,11	0,28	75,49	6,20	100,00
4.	Domba	45,90	-	-	49,18	4,92	100,00
5.	Kambing	20,18	-	-	43,64	36,17	100,00
6.	Ayam Buras	18,16	2,45	5,45	64,66	9,27	100,00
7.	Ayam Ras Pedaging	-	-	2,24	90,60	7,15	100,00
8.	Itik	4,35	6,05	0,22	85,50	3,89	100,00
9.	Lainnya	12,63	-	-	17,66	69,72	100,00
Jumlah		14,99	1,87	1,67	70,92	10,55	100,00

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Sebenarnya berbagai penyebab kesulitan pemasaran tersebut kemungkinan dapat teratasi jika peternak mau meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan dan penyuluhan baik yang dilaksanakan oleh koperasi maupun kelompok tani. Disamping mendapat bimbingan mengenai cara-cara beternak yang baik, juga dapat saling berbagi informasi dan pengalaman dengan peternak lainnya. Dan berbagi informasi ini juga dapat membuka akses yang lebih luas terhadap perkembangan usaha peternakan.

Jika dilihat kondisi ekonominya, dari 261.626 rumah tangga usaha peternakan terdapat 0,61 persen mengalami penurunan ekonomi, sedangkan 15,57 persen lainnya mengalami kekurangan uang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ada 31,09 persen yang menganggap berat pembiayaan sekolah.

Tabel 6.20. Persentase Rumah tangga Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Yang mengalami Penurunan Ekonomi, Kekurangan Uang Cukup Besar, dan Menganggap Berat Biaya Sekolah menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah tangga

No.	Uraian	Kepala Rumah tangga		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penurunan Ekonomi	0,62	0,58	0,61
2.	Kekurangan Uang Cukup Besar	15,58	15,44	15,57
3.	Menganggap Berat Biaya Sekolah	31,14	30,60	31,09
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Catatan : % : Persentase terhadap jumlah Rumah tangga usaha peternakan

Sumber: Sensus Pertanian 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu, dari 25.372 rumah tangga usaha peternakan yang kepala rumah tangganya perempuan terdapat 0,58 persen mengalami penurunan ekonomi, sedangkan 15,44 persen lainnya mengalami kekurangan uang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini sedikit lebih baik dari rumah tangga usaha peternakan yang kepala rumah tangganya laki-laki, ada sekitar 0,62 persen yang mengalami penurunan ekonomi, 15,58 persen mengalami kekurangan uang cukup besar untuk kebutuhan hidupnya, dan 31,14 persen yang menganggap berat pembiayaan sekolah

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Rumah tangga pertanian hasil ST03 sebanyak 1.262.421 rumah tangga (49,8 persen) dan 31,27 persen khusus menekuni usaha pertanian palawija.
2. Dilihat dari jenjang pendidikan yang dilakoni rumah tangga usaha palawija, ternyata lebih dari separuh (52,07 persen) petani yang hanya tamatan sekolah dasar (SD) ke bawah. Sedangkan yang sempat mengecap pendidikan tinggi (D1 ke atas) hanya 1,38 persen dari total rumah tangga usaha palawija.
3. Rumah tangga usaha tanaman palawija di Sumatera Utara masih termasuk kepada rumah tangga petani gurem. Hal ini ditunjukkan oleh 31,99 persen rumah tangga menguasai lahan dengan luas yang hanya mencapai < 0,50 Ha, disusul oleh 24,98 persen rumah tangga yang menguasai lahan dengan luas 1,00 – 1,99 Ha.
4. Berdasarkan komoditi terpilih, yaitu jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, dan ubi jalar, ongkos usaha tanaman palawija paling banyak terserap untuk upah tenaga kerja sebesar 23,48 persen dan pupuk sebesar 22,58 persen. Sedangkan pengeluaran untuk pestisida mengambil persentase yang terkecil yaitu 3,50 persen.
5. Rumah tangga usaha perkebunan di Sumatera Utara berdasarkan ST03 sebanyak 591.609 rumahtangga. Daerah ini memiliki kontribusi terbesar yaitu 9,06 persen dari total rumah tangga usaha perkebunan di Indonesia (6.528.924 rumah tangga).
6. Sekitar 28,03 persen memilih tanaman pisang sebagai tanaman hortikultura yang diusahakan, disusul oleh tanaman cabe merah sebesar 11,40 persen, tanaman rambutan sebesar 11,13 persen dan tanaman durian sebesar 10,10 persen.
7. Tingkat pendidikan yang ditamatkan, petani dan buruh tanaman hortikultura memiliki kesamaan tingkat pendidikan walaupun dengan jumlah yang berbeda.
8. Perbandingan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan rumah tangga terhadap produksi yang dicapai, rumah tangga yang mengusahakan tanaman bawang merah

memiliki persentase tertinggi yang mencapai 51,51 persen, disusul oleh tanaman bayam sebesar 42,06 persen, tanaman petsai/sawi sebesar 41,82 persen.

9. Jumlah rumah tangga usaha peternakan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 261.626 rumah tangga, atau sekitar 20,72 persen dari 1.262.421 rumah tangga pertanian di Sumatera Utara.
10. Sebagian besar rumah tangga usaha peternakan mengusahakan ternak babi yang mencapai 27,89 persen dan usaha ayam buras sebesar 25,19 persen.
11. Berbeda dengan rumah tangga usaha peternakan, jumlah peternak di Sumatera Utara ada sebanyak 292.834 orang, yang berarti bahwa dalam satu rumah tangga usaha peternakan ada lebih dari satu orang peternak/pengusaha ternak atau sekitar 1,12 orang per rumah tangga dan umumnya berumur antara 40 – 59 tahun dengan jumlah mencapai 52,02 persen.

7.2. Saran

1. Dukungan pemerintah berupa kebijakan yang lebih memihak pada pembangunan sektor pertanian dalam menggulirkan aktivitas ekonomi dan memberikan subsidi tepat sasaran yang terintegrasi dengan kebijakan makro ekonomi.
2. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur di daerah pertanian untuk peningkatan usaha ekonomi produktif dan pemberian akses pasar yang memadai.
3. Memberikan kesempatan kepada dunia usaha swasta menggarap dan memanfaatkan investasi baru di tingkat daerah untuk mengembangkan sistem agribisnis yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah.